



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**Jaga Kinerja Baik APBN, Tetap Waspada dan Optimis
Menghadapi Tantangan 2023**

Scan dan Unduh
APBN KITA





“APBN memulihkan ekonomi, terlihat dari sisi belanjanya dan kita melindungi masyarakat dari berbagai guncangan. Dengan Ekonomi yang semakin tumbuh dan pulih maka kita melihat APBN juga semakin bisa disehatkan. APBN yang sehat menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ringkasan Eksekutif | 7 |
| Postur APBN | 17 |
| Perkembangan Ekonomi Makro | 21 |
| Laporan Khusus | 24 |
| Penerimaan Pajak | 53 |
| Penerimaan Bea dan Cukai | 61 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 67 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 73 |
| Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 81 |
| Pembiayaan Utang | 87 |





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.377,50 triliun, meningkat 39,90 persen (yoy), yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.568,87 triliun atau 105,65 persen dari target APBN Perpres 98/2022 dan tumbuh 44,92 persen (yoy), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp280,22 triliun (93,71 persen terhadap target) dan tumbuh 20,65 persen (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp527,25 triliun (109,47 persen dari target) dan tumbuh 37,83 persen (yoy).

Penerimaan Hibah sebesar Rp1,16 triliun, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2,05 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.882,64 triliun atau 80,80 persen pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 17,72 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp877,72 triliun atau 92,82 persen pagu, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp937,31 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp1.004,82 triliun atau 74,11 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022 dan meningkat 51,78 persen (yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp731,72 triliun atau 90,92 persen dari alokasi APBN Perpres 98/2022, dan meningkat 2,91 persen (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Potensi pengetatan suku bunga di negara maju semakin meningkat untuk meredakan tekanan inflasi yang melonjak. Dalam *Federal Open Market Committee (FOMC) Desember 2022, the Federal Reserve System (FED)* menaikkan suku bunga sebesar 50 persen sesuai dengan ekspektasi pasar. Kenaikan ini menjadikan *Fed Funds Rate (FFR)* berada pada level 4,5 persen, menjadi tingkat suku bunga tertinggi dalam 15 tahun

terakhir. Negara-negara maju kembali meningkatkan tingkat suku bunga sesuai dengan ekspektasi pasar. Kondisi ini tentu memberikan tekanan pada pasar keuangan global dan memberikan tekanan pada nilai tukar, terutama di negara berkembang. Perkembangan harga komoditas masih *volatile*, namun cenderung menurun terutama harga minyak mentah. Di sisi lain, eskalasi risiko ekonomi global telah mengganggu aktivitas manufaktur global

yang digambarkan oleh *Purchasing Managers' Index* (PMI) Global di manufaktur dan jasa terus berada pada level kontraksi. Di sisi lain, stabilitas ekonomi nasional mengalami tekanan namun masih terkendali. Pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir November 2022 tercatat mencapai Rp2.377,50 triliun atau 104,91 persen terhadap target pada APBN Perpres 98/2022 (Target). Capaian tersebut lebih tinggi Rp678,06 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 39,90 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.849,09 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp527,25 triliun, dan Hibah Rp1,16 triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 40,63 persen (yoy) dan 37,83 persen (yoy), sedangkan penerimaan Hibah mengalami kontraksi sebesar 43,53 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian

masing-masing penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap Target masing-masing sebesar 103,65 persen, 109,47 persen, dan 199,69 persen.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir November 2022, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.568,87 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp280,22 triliun. Kinerja kedua komponen penerimaan perpajakan tersebut masih cukup kuat yang terlihat dari pertumbuhannya masih *double digits* dimana penerimaan Pajak tumbuh 44,92 persen (yoy) dan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 20,65 persen (yoy). Berdasarkan capaiannya terhadap Target, penerimaan Pajak telah melampaui target dengan capaian 105,65 persen, sedangkan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 93,71 persen.

Kinerja penerimaan Pajak didukung terutama oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing realisasinya sebesar Rp852,11 triliun atau tumbuh

53,63 persen (yoy) dan Rp615,95 triliun atau tumbuh 35,76 persen (yoy). Realisasi PPh Nonmigas ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesarnya yang kontribusinya lebih dari 80 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas yaitu PPh 25/29 Badan sebesar Rp325,83 triliun, PPh 21 sebesar Rp156,93 triliun, PPh Final sebesar Rp154,40 triliun, dan PPh 22 Impor sebesar Rp67,92 triliun. Kinerja empat komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas tersebut tumbuh berturut-turut 97,85 persen (yoy), 20,23 persen (yoy), 58,63 persen (yoy), dan 93,42 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik serta keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir November 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan di antaranya *tapering* relaksasi angsuran PPh 25 dan dampak penerimaan PPS. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN)

dan PPN Impor. Hingga akhir November 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 27,02 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp347,71 triliun yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan pemulihan perekonomian. Selain itu, dampak penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022 mendorong bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 44,50 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp244,07 triliun seiring peningkatan aktivitas impor.

Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai sebesar Rp195,74 triliun, Bea Masuk (BM) sebesar Rp45,79 triliun, dan Bea Keluar (BK) sebesar Rp38,69 triliun. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tersebut tumbuh *double digits*, yaitu berturut-turut 16,86 persen (yoy), 33,22 persen (yoy), dan 27,34 persen (yoy). Penerimaan Cukai didukung terutama oleh penerimaan komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tumbuh 16,54 persen (yoy) dengan kontribusi sebesar 67,25 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan

penyesuaian tarif cukai CHT serta kebijakan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, realisasi BM terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional yang didorong oleh kinerja produksi dan konsumsi yang meningkat. Sementara itu, kinerja BK didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor sampai dengan Q3 2022 untuk komoditas *Crude Palm Oil* (CPO), serta komoditas mineral tembaga yang juga masih meningkat.

Realisasi PNBPN sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp527,25 triliun atau 109,47 persen dari Target, atau tumbuh positif 37,83 persen (yoy).

Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBPN Lainnya. Secara lebih rinci, realisasi PNBPN SDA hingga akhir November 2022 mencapai Rp238,52 triliun atau tumbuh positif sebesar 89,34 persen (yoy). Pertumbuhan PNBPN SDA tersebut terutama didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBPN SDA, PNBPN yang berasal dari PNBPN KND juga mengalami tren positif dengan

capaian sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh positif 33,12 persen (yoy) terutama bersumber dari capaian positif laba BUMN Bank Himbara. Selanjutnya, realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp173,15 triliun atau tumbuh positif sebesar 40,62 persen (yoy). Peningkatan capaian PNBPN Lainnya antara lain disebabkan oleh membaiknya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, pendapatan minyak mentah (DMO), pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan perizinan tenaga kerja asing, dan pendapatan yang berasal dari layanan Kepolisian. Sedangkan di sisi lain, PNBPN Badan Layanan Umum (BLU) hingga akhir November 2022 masih mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian realisasi sebesar Rp74,98 triliun, atau tumbuh negatif sebesar 27,17 persen (yoy). Capaian pendapatan BLU terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kebijakan pelarangan ekspor sejak bulan April dan dilanjutkan dengan kebijakan perpanjangan pengenaan tarif pungutan ekspor sawit sebesar USD0 sejak 15 Juli 2022 dan penurunan pendapatan klaim BPJS.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp2.614,36 triliun atau tumbuh 84,20 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 Tahun 2022 (Pagu), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,16 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.882,64 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp731,72 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 17,72 persen (yoy) terutama dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja subsidi yang tumbuh 25,27 persen (yoy) untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi yang terjangkau masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas. Realisasi Bantuan Sosial hingga 30 November 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen atau mencapai Rp153,22 triliun, antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi belanja pegawai hingga akhir November 2022 mengalami pertumbuhan positif mencapai Rp372,60 triliun atau tumbuh 3,08 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja barang mengalami

kontraksi 16,27 persen (yoy) dipengaruhi menurunnya belanja barang yang terkait penanganan Covid-19 seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Realisasi belanja modal sudah mencapai Rp153,08 triliun yang lebih tinggi dari level pra-pandemi, antara lain pemanfaatannya untuk dukungan pengadaan/modernisasi peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan dan bendungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp205,90 triliun atau 72,59 persen dari Pagu, atau meningkat 25,27 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp148,15 triliun atau naik 44,57 persen (yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp57,75 triliun atau turun 6,69 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp102,42 triliun atau 68,57 persen dari Pagu, atau meningkat 90,48 persen

(yoy). Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg terutama dipengaruhi oleh kenaikan *Indonesia Crude Price* (ICP) rata-rata sebesar 45,35 persen (yoy) selama periode Januari-November 2022. Selain itu, hingga Oktober 2022, juga terjadi kenaikan volume LPG sebesar 4,38 persen (yoy). Pada tahun 2021, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg periode Januari-Oktober sebesar 6,17 juta MT, sedangkan pada tahun 2022 periode yang sama mencapai 6,44 juta MT. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp45,74 triliun atau 76,79 persen dari Pagu.** Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 6,11 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-November 2022 sebesar Rp57,75 triliun, atau 77,27 persen dari Pagu, masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp27,47 triliun atau 47,57 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Untuk realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp19,65 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu 34,03 persen. Meskipun demikian, secara keseluruhan realisasi

subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 6,69 persen (yoy). Penurunan ini di antaranya dipengaruhi oleh turunnya realisasi subsidi pajak sebesar 38,66 persen (yoy), subsidi kredit program juga mengalami penurunan sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, realisasi penyaluran anggaran subsidi pupuk selama periode Januari-November tetap mampu tumbuh positif sebesar 4,12 persen (yoy) meskipun jika dilihat dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi justru terjadi penurunan penyaluran selama periode Januari-November yaitu dari sebanyak 7,08 juta ton pada 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 6,89 juta ton pada 2022 atau mengalami penurunan sebanyak 2,67 persen. Selain itu, pupuk organik cair juga mengalami penurunan volume penyaluran dari tersalur sebanyak 202,44 ribu liter pada tahun 2021 menjadi tersalur hanya 67,96 ribu liter pada 2022 atau mengalami penurunan signifikan sebesar 66,43 persen (yoy). Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya penajaman pupuk bersubsidi, dari semula 6 jenis pupuk bersubsidi menjadi hanya 2 jenis saja yaitu Urea dan NPK sejak terbitnya Permentan

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp731,72 triliun atau 90,92 persen dari Pagu, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp668,41 triliun (90,72 persen) dan Dana Desa Rp63,31 triliun (93,1 persen). Realisasi TKD tersebut lebih tinggi Rp20,68 triliun atau meningkat 2,91 persen (yoy). Secara umum, peningkatan realisasi TKD didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp117,75 triliun atau tumbuh sebesar Rp36,11 triliun atau 44,23 persen (yoy) seiring dengan realisasi DBH reguler yang telah disalurkan sebesar Rp94,85 triliun (lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar Rp56,70 triliun) dan penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

Realisasi TKD sampai dengan akhir November 2022 lebih tinggi Rp21,89 triliun atau

meningkat sebesar 3,39 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Peningkatan jenis TKD di antaranya adalah: (i) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp369,03 triliun, lebih tinggi Rp0,2 triliun atau naik 0,05 persen (yoy), (ii) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp42,49 triliun, lebih tinggi Rp0,87 triliun atau naik 2,08 persen (yoy), dan (iii) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY mencapai Rp21,76 triliun, lebih tinggi Rp3,85 triliun atau naik 21,48 persen (yoy). Realisasi Dana Otsus dan Dais DIY telah tersalurkan sebesar 100 persen dari Pagu.

DAK Nonfisik dan Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp111,9 triliun atau lebih rendah Rp11,16 triliun atau turun 9,07 persen (yoy) yang disebabkan oleh penurunan kinerja penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp10,56 triliun atau turun 19,64 persen (yoy), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,15 triliun atau turun 2,19 persen

(yoy), dan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan sebesar Rp0,96 triliun atau turun 73,97 persen (yoy). Realisasi DID mencapai Rp5,49 triliun atau lebih rendah Rp7,97 triliun atau turun 59,2 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan pagu total DID yang lebih rendah pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi Dana Desa mencapai Rp63,31 triliun atau lebih rendah Rp1,2 triliun atau turun 1,87 persen (yoy) seiring dengan adanya syarat penyaluran yang belum terpenuhi.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir November 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp236,86 triliun atau sekitar negatif 1,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto dalam APBN Perpres 98/2022 (PDB). Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir November 2022 mencapai Rp439,89 triliun atau 52,40 persen dari Pagu. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir November 2022 mencapai Rp510,22 triliun atau 54,1 persen dari Pagu. Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp504,28 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp5,94 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri

sebesar Rp4,05 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1,89 triliun. Hingga akhir November 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp5,76 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp1,72 triliun. Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp71,99 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp70,10 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp72,76 triliun untuk Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp52,84 triliun, Investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp8,98 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp8,84 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp19,79 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir November 2022 terealisasi sebesar Rp2,94 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp623,10 miliar hingga akhir November 2022 untuk Pembiayaan Lainnya serta mengalokasikan Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,13 triliun.

Halaman Ini Dikosongkan



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2022 mencatatkan defisit sebesar 1,21 persen terhadap PDB (periode yang sama pada tahun 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar 3,60 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.377,50 triliun, meningkat 39,90 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.614,36 triliun atau 84,16 persen terhadap Pagu dan tumbuh 13,16 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp1.849,09 triliun atau 103,65 persen dari Target dan tumbuh 40,63 persen (yoy). Realisasi ini terdiri dari

Penerimaan Pajak sebesar Rp1.568,87 triliun atau 105,65 persen dari Target dan tumbuh 44,92 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai sebesar Rp280,22 triliun atau 93,71 persen dari Pagu dan tumbuh 20,65 persen (yoy).

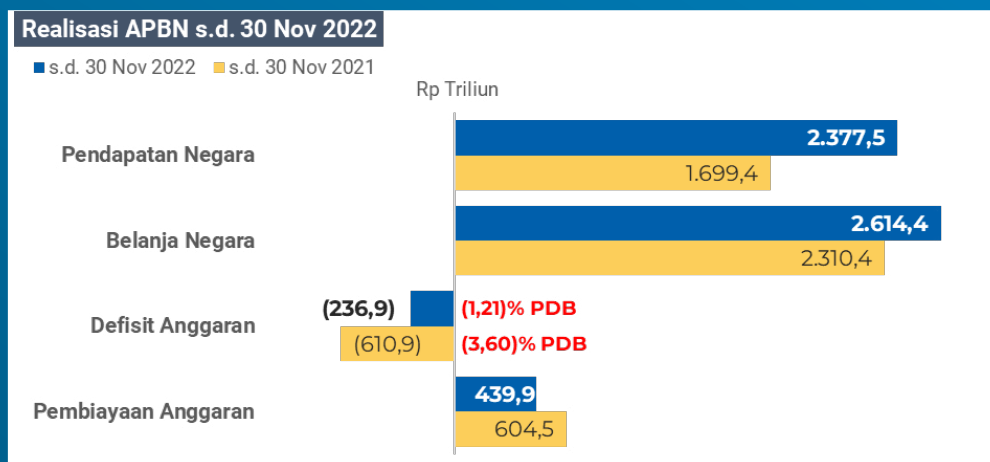
Realisasi PNBPN yang telah mencapai Rp527,25 triliun atau 109,47 persen dari Target dan tumbuh 37,83 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp1,16 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2,05 triliun.

Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar 84,16 persen dari Pagu, terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.882,64 triliun atau

Realisasi APBN s.d 30 November 2022

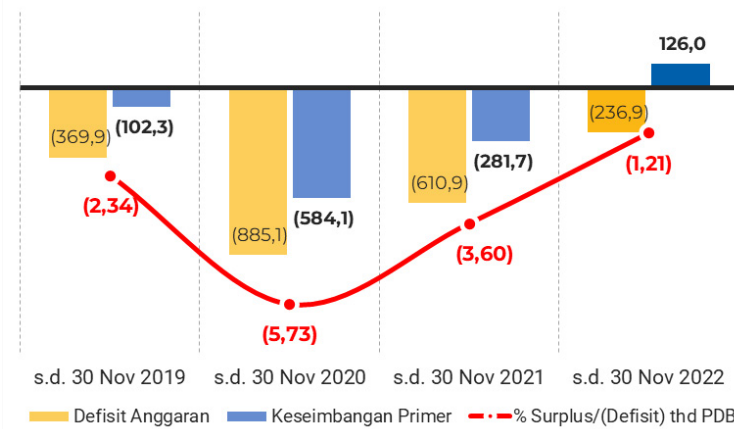


Realisasi APBN s.d 30 November 2022

| APBN (triliun rupiah) | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | APBN | Realisasi s.d. 30 Nov | % thd APBN | Growth (%) | Perpres 98/2002 | Realisasi s.d. 30 Nov | % thd Perpres 98/2002 | Growth (%) |
| A. PENDAPATAN NEGARA | 1.743,65 | 1.699,44 | 97,46 | 19,42 | 2.266,20 | 2.377,50 | 104,91 | 39,90 |
| I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.742,75 | 1.697,39 | 97,40 | 20,06 | 2.265,62 | 2.376,34 | 104,89 | 40,00 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 1.444,54 | 1.314,84 | 91,02 | 18,58 | 1.783,99 | 1.849,09 | 103,65 | 40,63 |
| a. Pajak | 1.229,58 | 1.082,58 | 88,04 | 16,99 | 1.484,96 | 1.568,87 | 105,65 | 44,92 |
| b. Kepabeanan dan Cukai | 214,96 | 232,25 | 108,05 | 26,58 | 299,03 | 280,22 | 93,71 | 20,65 |
| 2. PNBP | 298,20 | 382,55 | 128,29 | 25,43 | 481,63 | 527,25 | 109,47 | 37,83 |
| II. Penerimaan Hibah | 0,90 | 2,05 | 227,16 | (78,00) | 0,58 | 1,16 | 199,70 | (43,54) |
| B. BELANJA NEGARA | 2.750,03 | 2.310,35 | 84,01 | 0,09 | 3.106,43 | 2.614,36 | 84,16 | 13,16 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.954,55 | 1.599,32 | 81,83 | 2,51 | 2.301,64 | 1.882,64 | 81,80 | 17,72 |
| 1. Belanja K/L | 1.031,96 | 937,31 | 90,83 | 9,98 | 945,75 | 877,82 | 92,82 | (6,35) |
| 2. Belanja Non K/L | 922,59 | 662,01 | 71,76 | (6,49) | 1.355,89 | 1.004,82 | 74,11 | 51,78 |
| II. Transfer Ke Daerah | 795,48 | 711,04 | 89,38 | (4,95) | 804,78 | 731,72 | 90,92 | 2,91 |
| C. KESEIMBANGAN PRIMER | (633,12) | (281,70) | 44,49 | (51,77) | (434,36) | 125,96 | (29,00) | (144,71) |
| D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN | (1.006,38) | (610,92) | 60,70 | (30,98) | (840,23) | (236,86) | 28,19 | (61,23) |
| % Surplus/(Defisit) thd PDB | (5,70) | (3,60) | | | (4,50) | (1,21) | | |
| E. PEMBIAYAAN ANGGARAN | 1.006,38 | 604,48 | 60,06 | (45,12) | 840,23 | 439,89 | 52,35 | (27,23) |
| Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran | - | (6,43) | | | - | 203,03 | | |

Angka dalam Triliun Rupiah

Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer



81,80 persen dari Pagu dan meningkat 17,72 persen (yoy), terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp877,82 triliun atau 92,82 persen dari Pagu (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp937,31 triliun) dan realisasi Belanja non-K/L sebesar Rp1.004,82 triliun atau 74,11 persen dari Pagu dan meningkat 51,78 persen (yoy).

Transfer ke Daerah sebesar Rp731,72 triliun atau 90,92 persen dari Pagu, meningkat 2,91 persen (yoy).

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 30 November 2022 mengalami defisit sebesar Rp236,86 triliun (1,21 persen PDB). Sementara itu, keseimbangan primer surplus sebesar Rp125,96 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp439,89 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp203,03 triliun.

Perkembangan Keseimbangan Ekonomi Makro



Perkembangan Ekonomi Makro

Aktivitas ekonomi nasional masih terus melaju dengan kuat di tengah peningkatan prospek perlambatan ekonomi global.

PDB nasional pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,7 persen (*yoy*), sehingga secara kumulatif tumbuh sebesar 5,4 persen. Di pertengahan kuartal IV 2022, beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan kinerja yang positif. PMI sektor Manufaktur nasional masih berada pada level

ekspansi. Dari sisi konsumsi, tingkat belanja masyarakat yang dilihat dari *Mandiri Spending Index* meningkat di November 2022 didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen yang juga masih terjaga, mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kedepan. Selain itu, neraca perdagangan nasional juga terus menunjukkan kinerja yang positif.

Stabilitas pasar keuangan nasional masih terjaga ditengah tekanan akibat tekanan likuiditas keuangan global.

Tekanan kondisi keuangan global terhadap pasar keuangan nasional relatif moderat karena didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat. Pasar saham domestik masih cukup kuat meskipun melemah dan IHSG tercatat 6.768,32 pada 20 Desember 2022. Nilai tukar Rupiah kembali tertekan dan tercatat sebesar Rp15.608 per USD pada 20 Desember 2022. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 9,4 persen dibandingkan levelnya diawal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 20 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.850 per USD. Tekanan terhadap inflasi lebih moderat dibandingkan perkiraan dan pada November 2022 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (*mtm*). Sehingga, Inflasi pada bulan November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (*yoy*) atau 4,82 persen (*ytd*). Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir November 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar USD134,0 miliar.

Aktivitas pariwisata nasional terus memperlihatkan penguatan dengan adanya peningkatan secara pesat jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke dalam negeri.

Peningkatan aktivitas sektor pariwisata ini akan mendorong aktivitas sektor pendukung lainnya seperti, makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Oktober 2022 meningkat tajam mencapai 678,53 ribu kunjungan, naik lebih tiga kali lipat dibandingkan dengan kunjungan Oktober 2021. Hingga Oktober 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 3,92 juta kunjungan, meningkat tajam dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021 yang hanya tercatat sebesar 1,24 juta kunjungan. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 52,31 persen pada Oktober 2022 naik sebesar 6,69 poin dibandingkan kondisi Oktober 2021.

Halaman Ini Dikosongkan

Jaga Integritas dan Terus Bertumbuh

Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN, selalu mengupayakan dan memastikan bahwa APBN memang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selama pandemi, pemerintah juga telah menyusun berbagai kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Instrumen APBN Tahun 2023 pun telah didesain agar dapat optimis sejalan

dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, namun harus tetap waspada karena adanya disrupsi global dan kondisi geopolitik.

Oleh karena itu, pengawasan bersama terhadap pengelolaan keuangan negara dari aparat pengawasan internal, eksternal, serta aparat penegak hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemenkeu berperan aktif menjaga sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas

dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta dipercaya publik.

Kerja sama antarinstansi dan lembaga pun perlu diperkuat, khususnya dalam menjaga kinerja dan semangat integritas. Dengan adanya semangat antikorupsi, pengelolaan keuangan negara diharapkan menjadi lebih optimal. Guna mewujudkan hal tersebut, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu tahun ini mengusung tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”, yang sejalan dengan tema Hakordia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi”. Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh mengatakan bahwa tema tersebut merupakan cerminan kondisi dan optimisme bangsa Indonesia untuk dapat bangkit dan pulih dari pandemi.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa seluruh Unit Eselon I, LNSW, BLU, dan SMV, baik di pusat maupun di tingkat unit vertikal turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2022. Berbagai kegiatan

telah diselenggarakan dalam bentuk *Road to Hakordia 2022* di antaranya berupa enam belas *webinar/sharing session* dengan berbagai tema terkait integritas. Berbagai variasi kegiatan juga dilakukan untuk menysasar berbagai kalangan. Kegiatan mulai dari lelang gratifikasi, edukasi antikorupsi untuk pelajar, lima lomba bertema integritas, serta kampanye antikorupsi dari komunitas sepeda.

Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini merupakan sarana dan media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. “Semoga kita selalu diingatkan untuk terus menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik, *modern*, profesional, dan berkualitas,” harap Inspektur Jenderal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam *keynote speech*-nya menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang harus terus menerus dilawan. Dalam melawan korupsi, institusi yang kuat harus terbangun dan memiliki *control, check and balance*. “Karena *absolut power, corrupt absolutely*. Semakin tinggi kewenangan kita, semakin besar kewajiban kita untuk menjaga dan mengelolanya,” ujar Menkeu.

Pengalaman dari berbagai negara di dunia, penyebab suatu negara mengalami kegagalan untuk maju atau disebut dengan *middle income trap* adalah karena masalah kualitas sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi yang tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga tiap kali maju, efek korupsi menggerogoti setiap upaya kemajuannya dan membuat negara-negara ini terus menerus terperangkap di dalam negara yang hanya setengah maju.

Sri Mulyani mengakui bahwa ketika menjabat sebagai *Managing Director World Bank* dan mengunjungi lebih dari 100 negara, ternyata memberikan perspektif yang luar biasa mengenai tata kelola, korupsi, dan *institutional arrangement* yang sangat menentukan kemajuan suatu negara. Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu tidak boleh membiarkan institusi menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan *fundamental*. Seluruh unit Kemenkeu memiliki kewajiban tidak hanya mengidentifikasi masalah tata kelola namun juga melakukan koreksi dengan segera.

Dalam mengelola keuangan negara, tentu tuntutan antara

akuntabilitas dan kepatuhan sangat tinggi. Namun juga dituntut untuk efektif dan cepat tanggap dalam mencari solusi. Bagaimana bisa menciptakan respons yang cepat dan efektif namun tidak terpeleset pada akuntabilitas dan kepatuhan. Sering kekhawatiran terhadap akuntabilitas mendominasi dibandingkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan responsif. “Jangan sampai seolah-olah untuk mencapai tujuan, kita harus mengorbankan akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan,” tambah Menkeu.

Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan proses bisnis memiliki model tiga lini atau bahkan menjadi empat lini. Lini pertama adalah kita sebagai individu karena manusia itu akan terus mendapat godaan. *Personal responsibility* sebagai individu adalah menjaga hati dan tetap berintegritas, “Sehingga pada saat Anda menghadapi godaan yang membolak balikkan hati Anda. Anda tahu kapan, dan tahu harus menuju ke arah yang benar,” tegas Menkeu.

Peranan APBN di dalam setiap guncangan pasti



sangat penting dan keuangan negara menjadi instrumen yang diandalkan. Dalam setiap guncangan, masyarakat harus menyelamatkan diri sendiri dan disitulah negara hadir. Kehadiran negara ini akan selalu identik dengan keuangan negara. Menkeu mengajak untuk bersama-sama gunakan momentum hari antikorupsi ini untuk terus mempelajari berbagai dimensi detail di dalam membangun tata kelola yang baik.

“Karena itu dalam peringatan hari antikorupsi tidak hanya penekanannya pada jargon antikorupsi, tapi merupakan suatu jawaban yang efektif dan *real* bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju dan memberantas penyakit yang sangat fatal yaitu

korupsi, bagaimana kita menjaga integritas, dan terus bertumbuh. Tidak hanya sekedar pulih, tapi terus bertumbuh,” ujar Menkeu.

Peringatan Hakordia diselenggarakan dalam format *speech series* dengan menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus. *Speech series* para pimpinan tinggi instansi dan lembaga ini sebagai wujud komitmen dalam menjalankan amanat negara secara bertanggung jawab dan wujud strategi pencegahan korupsi dan penindakan atas pelanggaran.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan persoalan KPK saja. "Ini urusan dan persoalan kita bersama. Lewat Hakordia semoga kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan di tempat kita bekerja," ujar Wakil Ketua KPK.

Senada dengan Marwata, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara juga menegaskan bahwa BPK turut berperan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara. BPK juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi kedua belah pihak tanpa mengganggu independensi masing-masing.

Korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi di semua negara dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, akses kebutuhan dasar masyarakat, dan jaminan pemenuhan HAM. Karena itu, korupsi merupakan permasalahan serius yang

membutuhkan penyelesaian luar biasa. Peran kejaksaan tidak hanya pada hukum semata, tapi juga melalui perubahan paradigma penanganan korupsi berupa tindakan preventif dan represif.

"Melalui peringatan Hakordia ini, kami mengajak kembali agar kita bersama-sama menyatukan tekad dan semangat memberantas korupsi, demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jampidsus, Undang Mogopal.

Pada acara ini, Wakil Menteri Keuangan juga melakukan pengukuhan pengurus Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (PAKSI-API) dari Kementerian Keuangan dan unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu. Forum tersebut beranggotakan 412 PAKSI dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu dan 3 orang API dengan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK).

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Sejak tahun ini, Kemenkeu diberikan kewenangan melaksanakan evaluasi ZI WBK/WBBM secara mandiri melalui berbagai tahapan yang panjang dan berjenjang termasuk berkolaborasi dengan Kementerian PAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengukuhkan 269 unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 ini sebagai momentum sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kerja sama antarinstitusi dan lembaga, khususnya dalam menjaga kinerja dan semangat integritas yang semakin kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara pun lebih optimal.

Empat Substansi Baru PP Nomor 44 Tahun 2022

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak. Selain itu,

pengaturan PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Di dalam beleid yang berlaku sejak 2 Desember 2022 tersebut, terdapat empat substansi baru yang diatur. **Pertama**, tentang pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan

pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM. Pihak lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi, paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam hal pihak lain tersebut melakukan transaksi dengan pemungut PPN Pasal 16A UU PPN atau memfasilitasi transaksi pemungut PPN Pasal 16A tersebut, PPN atau PPN dan PPnBM tetap dipungut oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kedua, terdapat pengaturan lebih lanjut terkait Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), yang meliputi: pemberian cuma-cuma BKP/ JKP; penegasan pengenaan PPN atas penyerahan BKP/ JKP yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun nonoperasional; pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur; serta penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah yang tidak dikenai PPN

sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya.

Ketiga, pengaturan terkait penggunaan Besaran Tertentu. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu; melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu, dapat memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Yang dimaksud dengan besaran tertentu sebagaimana adalah hasil perkalian formula tertentu dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual, penggantian, atau nilai tertentu.

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP yang menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan.



Demikian pula apabila PKP yang menggunakan besaran tertentu melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN terutangnya tidak dipungut atau dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN, berlaku ketentuan Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang PPN terutangnya tidak dipungut atau dibebaskan tersebut tidak dapat dikreditkan. Dalam hal PKP yang menyerahkan BKP dengan menggunakan besaran tertentu melakukan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan/atau melakukan penyerahan antarcabang, PKP memungut PPN terutang dengan DPP sebesar nol rupiah.

Keempat, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur

pajak wajib dibuat pada saat penyerahan atau ekspor BKP dan/atau JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Apabila dokumen tertentu tersebut dibuat setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak seharusnya dibuat, maka tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Selain empat hal tersebut, terdapat juga beberapa hal yang merupakan penyempurnaan dari PP sebelumnya, yaitu: pembeli atau penerima jasa yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM dapat

memenuhinya secara *self assessment* menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); penyesuaian pengaturan terkait BKP/JKP, meliputi penghapusan terminologi dan pengaturan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan penyesuaian teknis pengenaan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang; penyesuaian penghitungan PPN dan PPnBM; penyesuaian DPP yang digunakan dalam rangka penentuan PPN dan PPnBM dalam hal dilakukan pemeriksaan; serta penentuan kurs Menteri Keuangan yang digunakan untuk menghitung PPN atau PPN dan PPnBM terutang dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah.

Pajak yang Melewati Jalanan Terjal dan Berlubang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian Kementerian Keuangan memiliki 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang siap melayani wajib pajak sampai ke ujung negeri. KP2KP merupakan kantor pajak yang menjadi perpanjangan tangan di beberapa KPP yang wilayah kerjanya terlalu luas.

Banyak cerita menarik dari berbagai KP2KP saat para pegawai melayani dan mengedukasi wajib pajak di daerah yang sulit dijangkau. Melewati jalanan terjal dan berlubang atau menghantam deras ombak adalah keseharian.

Mengedukasi di Mana Pun

Pegawai KP2KP adalah garda terdepan dalam memberikan edukasi di berbagai wilayah yang susah diakses. Digitalisasi memudahkan



penyampaian edukasi melalui media daring, namun masih ada daerah yang susah mengakses hal tersebut. Di sinilah peran KP2KP.

Edukasi perpajakan harus disampaikan tanpa pandang bulu agar masyarakat mengetahui secara utuh informasi perpajakan. Pengetahuan ini dapat mendongkrak tingkat kepatuhan perpajakan karena membuat wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan sukarela. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pegawai terhadap gaji yang mereka terima dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.

DJP memberikan edukasi di semua lini. Edukasi bagi wajib pajak dilakukan dengan membahas aturan perpajakan terbaru atau masalah teknis lain. DJP juga memberikan edukasi bagi siswa dan mahasiswa yang akan menjadi calon wajib pajak dengan mengadakan Pajak Bertutur, *Tax Goes to School*, dan *Tax Goes to Campus*.

Edukasi pajak tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang pajak, namun juga ada menyelipkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. Ini bertujuan agar masyarakat paham siapa yang mengumpulkan uang negara dan siapa yang membelanjakannya.

Tidak hanya edukasi, KP2KP juga melayani administrasi perpajakan. Wajib pajak harus mendapatkan pelayanan perpajakan yang sama di semua tempat, seperti halnya edukasi. Daerah yang sulit dijangkau pun harus merasakan layanan perpajakan setara dengan kota besar. Salah satu inovasi yang dilakukan KP2KP adalah menyediakan *Mobile Tax Unit* yang siap menerjang berbagai medan untuk menemui wajib pajak agar administrasi perpajakannya terlayani.

Dikumpulkan lalu Dibelanjakan

Pencapaian target penerimaan DJP pada tahun 2022 sudah mencapai lebih dari seratus persen. Pencapaian ini juga terjadi pada tahun 2021 setelah menunggu dua belas tahun. Melihat capaian dua tahun ke belakang, DJP optimis bisa mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023. Target penerimaan pajak 2023 adalah sebesar Rp1.718 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun.

Mengumpulkan pendapatan negara dari penerimaan pajak adalah tugas DJP. Kegiatan mengumpulkan tidak hanya dilakukan dengan menagih

pajak pada masyarakat, edukasi yang dilakukan kantor pajak juga menjadi cara agar masyarakat membayar pajak dengan sukarela. Mengumpulkan penerimaan negara dilakukan pula dengan memberikan insentif kepada wajib pajak yang membutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi. Harapannya hal tersebut meningkatkan pembayaran pajak mereka di masa depan. DJP selalu hadir bagi masyarakat yang terdampak ekonomi dengan memberikan insentif dan berada di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi.

Presiden Joko Widodo pada 1 Desember 2022 melakukan penyerahan DIPA dan Alokasi TKD tahun anggaran 2023 ke seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara simbolis. Penyerahan ini menandakan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mulai mempersiapkan penyerapan anggaran. Diharapkan DIPA dan Alokasi TKD dapat langsung ditindaklanjuti di awal tahun agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan perekonomian. Semakin cepat dibelanjakan, maka efek yang

akan dihasilkan akan semakin cepat pula terasa.

Belanja negara di APBN 2023 ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Pemerintah memiliki bagian tersendiri yang ditugaskan untuk melakukan belanja atau penyerapan anggaran. Misalnya belanja vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau pembangunan daerah yang dirumuskan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing pemerintah daerah.

APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan: penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibu Kota Nusantara, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Uang yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan definisi pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Edukasi yang dilakukan kantor pajak kepada masyarakat terkait alur pengelolaan keuangan negara dapat membantu masyarakat dalam mengawasi tanggung jawab pemerintah tersebut. Mereka dapat menyampaikan aspirasi kepada bagian yang sesuai dengan argumen yang tepat ketika sudah memiliki pengetahuan tentang keuangan negara.

Selain mengumpulkan penerimaan pajak, DJP bertugas menyampaikan edukasi perpajakan termasuk pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Ratusan KPP dan KP2KP adalah lini depannya. Apa pun kondisi medannya, DJP siap menyampaikan edukasi agar masyarakat dapat ikut mengetahui cara mengawal pembangunan agar jalanan terjal dan berlubang bisa berubah mulus.

SBN Ritel Amat Diminati, Kuota Sukuk Tabungan ST009 Habis Sebelum Waktunya

Sukuk Tabungan (ST) seri ST009 menutup tahun 2022 dengan apik. Seri SBN Ritel terakhir yang diterbitkan pemerintah di tahun ini berhasil menghimpun Rp10 triliun untuk membantu pembiayaan APBN 2022. Jumlah tersebut berasal dari kontribusi 35.397 masyarakat Indonesia yang didominasi oleh investor Generasi Y/Milenial (19.075 orang atau 53,89 persen dari total investor). Proporsi investor Generasi Y/Milenial

tersebut bahkan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel. Hal yang lebih menarik, minat investor yang membludak membuat target nasional ST-009 tercapai lebih cepat, yaitu 2 hari sebelum masa penawaran ditutup.

Dari sisi nominal maupun jumlah investor, hasil penjualan ST009 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel *Non-tradable* (dengan fitur tidak



dapat diperjualbelikan di pasar sekunder) dan terbesar kedua sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel *Non-tradable* (setelah SBR011 yang terbit Juni 2022). Selain itu, rata-rata total pemesanan harian pada 5 hari kerja pertama di masa penawaran (tanggal 11,14 s.d. 17 November 2022) mencapai Rp1,34 triliun. Atau dengan kata lain, mencapai sekitar 4,5 kali rata-rata pemesanan harian seri-seri SBN ritel sebelumnya, yaitu sekitar Rp300 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa animo investor individu domestik masih sangat tinggi, serta SBN Ritel masih diminati dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia di tengah kondisi pasar keuangan yang belum stabil dan tren potensi kenaikan *yield* di pasar SBN domestik.

Pemerintah senantiasa menggali dan mengembangkan inovasi guna mendukung pembiayaan APBN, salah satunya melalui penerbitan SBN ritel yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti *Green Sukuk Ritel*. ST009 juga merupakan bagian dari *Green Sukuk Ritel*, yaitu SBN Ritel yang diterbitkan dengan format *green* atau hijau. Dengan menggunakan format hijau berarti seluruh hasil penerbitan ST009 akan digunakan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Ini Dua Poin Utama Perubahan PMK Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Dewasa ini, perdagangan internasional bukan lagi hal yang asing. Mulai dari negara, perusahaan multinasional, hingga individu telah rutin mendatangkan komoditas impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang perekonomian dalam negeri. Atas barang-barang impor tersebut, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yang salah satu komponen perhitungannya ialah nilai

pabean. Ketentuan terbaru terkait nilai pabean telah dirilis Kementerian Keuangan dan mulai berlaku per 1 Januari 2023.

Ketentuan baru atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2022, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 62/PMK.04/2018. Kepala Subdirektorat Humas dan



Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Kamis (15/12) mengatakan penyempurnaan itu dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka penetapan nilai pabean, meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan, serta memanfaatkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam proses bisnis di bidang kepabeanan.

Secara umum, menurut Hatta terdapat dua klasifikasi jenis perubahan pada pengaturan terbaru terkait nilai pabean, yaitu prosedural penelitian nilai pabean dan konsep nilai pabean. Untuk prosedur penelitian nilai pabean, poin utama pengaturan terbaru di antaranya ketentuan baru mengenai penentuan nilai pabean yang harus dilakukan oleh importir/pemilik barang (*self-assessment*), perubahan mekanisme deklarasi nilai

pabean dan informasi nilai pabean menjadi elemen data pada kolom pemberitahuan impor barang, perubahan uji kewajaran menjadi *risk assessment* nilai pabean secara otomatis, penambahan ketentuan penelitian nilai pabean, pengurangan subjek yang tidak dilakukan penelitian nilai pabean, penambahan ketentuan hasil penetapan nilai pabean, dan penegasan ketentuan penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu, untuk konsep nilai pabean, masih menurut Hatta poin utama pengaturan terbaru di antaranya penambahan objek nilai yang tidak termasuk dalam nilai transaksi, pengaturan norma penghitungan *freight* dan *insurance* termasuk ke dalam nilai transaksi barang yang bersangkutan, syarat penggunaan metode nilai

transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa, kriteria pemberitahuan pabean impor untuk penggunaan metode nilai transaksi barang identik atau barang serupa, dan penyesuaian untuk penggunaan metode nilai transaksi barang identik atau barang serupa dengan kondisi lain. Lalu, juga terdapat perubahan dan penambahan ketentuan penggunaan metode *fallback*, penambahan ketentuan terkait nilai transaksi, perbaikan formulasi penghitungan bea masuk mengandung *assist*, penambahan ketentuan pengujian hubungan penjual dan pembeli, dan perluasan penggunaan metode *fallback*.

“Kami berharap masyarakat, khususnya para pengguna jasa kepabeanan dapat membaca aturan terbaru ini secara utuh agar implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang

ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat menghubungi Bea Cukai melalui *Contact Center Bravo* Bea Cukai di nomor 1500225 atau melalui *live web chat* di linktr.ee/bravobeacukai,” tutup Hatta.

Scan Ketentuan
Perhitungan Bea Masuk



Sinergi Antarinstansi Dorong Implementasi NLE

Sejak diinisiasi pada pertengahan tahun 2020, program *National Logistics Ecosystem* (NLE) yang merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2020 telah mulai menghadirkan jaringan ekosistem logistik berbasis digital secara bertahap dan berkelanjutan.

“Seperti yang kita ketahui, NLE merupakan ekosistem logistik nasional yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional

sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang dan sebaliknya. Dengan mengacu pada empat pilar, yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan dan fasilitas pembayaran, serta tata ruang kepelabuhan, NLE diharapkan mampu mendorong biaya logistik yang kompetitif dan transparansi layanan-layanan logistik,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana.



Pembangunan dan penyempurnaan sistem *information technology* (IT) yang merupakan *backbone* NLE terus dilakukan. Di sektor layanan logistik pemerintahan, NLE hadir dengan layanan *Single Submission* (SSm) yang meliputi SSm Pabean Karantina, SSm Pengangkut, dan SSm Perizinan. Layanan-layanan lainnya yang menjadi bagian dari program NLE yaitu *DO Online*, *SP2 Online*, *Autogate/Gate System*, *Single Truck ID* (STID).

Beberapa sistem lainnya, menurut Hatta hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan, yaitu sistem *Single Billing* PNBPN dalam rangka SSm Pengangkut yang sedang dikembangkan oleh Kemenkeu dan sistem *Terminal Booking System* (TBS) oleh

Pelindo. Dengan melibatkan dukungan lebih dari lima belas kementerian/lembaga, potensi membangun sistem layanan logistik nasional yang lebih efisien terasa semakin terbuka.

“Dari sektor kolaborasi dengan platform-platform logistik sektor bisnis, saat ini NLE telah terkolaborasi dengan platform *trucking*, *warehouse*, *vessel*, dan depo. Tahapan berikutnya adalah mematangkan dan memperluas kolaborasi dengan sebagian besar entitas logistik (baik sektor pemerintah maupun swasta) ke dalam ekosistem yang telah dibangun sesuai perannya masing-masing, serta mendorong pemanfaatan layanan yang tersedia,” ujarnya.

Sistem layanan NLE saat ini telah diterapkan secara

bertahap menyesuaikan kondisi dan *level maturity system* pada empat belas lokasi pelabuhan nasional, sesuai dengan target implementasi dalam Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Batam, Makassar, Merak, Balikpapan, Samarinda, Kendari, Palembang, Dumai, Lampung, dan Pontianak.

Disebutkan Hatta memasuki triwulan III tahun 2022, telah dimulai secara bertahap penilaian melalui metode survei persepsi terhadap beberapa layanan NLE yang dinilai sudah dapat terukur efektivitasnya. Survei dilakukan bekerja sama dengan lembaga independen Prospera yang meliputi layanan SSm QC, SSm Perizinan, DO *Online*, SP2 *Online*, dan *Gate System*, dan *Trucking*. Saat ini juga tengah dibahas dibahas rencana pengukuran *cost logistic* bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan World Bank. Penjajakan awal terkait pengukuran ini juga akan dikolaborasikan dengan Bappenas.

Penerimaan Negara Berbasis Kinerja

Dalam APBN, terdapat Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja telah diimplementasikan sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja diterapkan sejak tahun 2018 berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Agar *in line* dengan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran (Belanja APBN) yang telah berbasis kinerja, maka Pendapatan APBN seharusnya berbasis kinerja juga. Untuk itu, dibutuhkan *tools* yang dapat mengukur kinerja Penerimaan Negara.

Sejak implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN G1) hingga diberlakukan PMK nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik tanggal Januari 2021, atas realisasi Pendapatan APBN atau Penerimaan Negara belum dilakukan pengukuran/penilaian berdasarkan kinerja untuk memastikan Kepatuhan dan Efektivitas Pengelolaan Transaksi Penerimaan Negara oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya sebagai *Collecting Agent* MPN yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb Kemenkeu).

Kinerja Penerimaan Negara sangat penting untuk memastikan program-program Pemerintah Pusat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja penerimaan negara tidak hanya diukur dari tax ratio, tetapi juga dari ketepatan waktu dan jumlah nominal Penerimaan Negara yang dilimpahkan ke Kas Negara setiap hari kerja dari Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) sebagai *Collecting Agent* Modul Penerimaan Negara (MPN).

Untuk meningkatkan layanan Penerimaan Negara kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor (wp/wb/ws), DJPb bersama unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya, yaitu Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Pajak (DJP), dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan transformasi sistem penerimaan negara secara elektronik melalui MPN yang memuat prosedur pembayaran, pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan transaksi Penerimaan Negara yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN).

Transaksi MPN yang dimaksud berupa Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pembiayaan Surat Berharga Negara Ritel, Hibah, dan Penerimaan Lainnya, seperti Perhitungan Fihak Ketiga, Pengembalian Belanja Negara, Sisa/Tambahan Uang Persediaan, Jasa Bank, Pajak Rokok, serta Penjualan Aset Bank Likuidasi.

Melalui MPN, penerimaan negara menjadi lebih praktis, cepat, dan aman sehingga wp/wb/ws dapat membayar penerimaan negara kapan pun dan di mana pun (24/7). Transformasi sistem penerimaan negara secara

elektronik tidak terlepas dari kerja sama yang sinergis antara Kementerian Keuangan dan *Collecting Agent* yang menyediakan Kanal MPN dan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara untuk diserahkan kepada wp/wb/ws secara realtime pada saat transaksi

MPN sebagai salah satu sistem utama yang dikembangkan selain SPAN dan SAKTI selama lebih dari 15 tahun, saat ini mencapai generasi ke-3 (MPN G3). Sejak tahun 2007, MPN G1 mengintegrasikan sistem penerimaan negara dari 3 unit eselon I Kementerian Keuangan yang terpisah-pisah, yaitu Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) di DJA, Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) di DJP, dan *Electronic Data Interchange* (EDI) di DJBC. DJPb meluncurkan MPN G1 pada tanggal 1 Januari 2007 sebagai upaya menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan transaksi Penerimaan Negara.

Awalnya, pembayaran Penerimaan Negara dengan MPN G1 masih dilakukan secara manual, hanya melalui *Teller Bank Persepsi* atau Loker Pos Persepsi sehingga hanya terbatas sampai dengan pukul 15.00 setiap hari kerja. Rekening Penerimaan Negara untuk menampung dan melimpahkan ke Kas Negara masih tersebar pada cabang

Bank/Pos Persepsi sehingga data transaksi Penerimaan Negara masih terpisah-pisah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kabupaten/kota dalam mata uang Rupiah dan belum tersedia dalam valuta asing.

MPN G1 terus dikembangkan menjadi MPN G2 yang diresmikan tanggal 27 Februari 2014 dengan inovasi yaitu pembayaran penerimaan negara dapat menggunakan kode *billing* melalui *teller bank, internet banking, mobile banking*, dan ATM. Dengan sistem *billing* pada MPN G2, wp/wb/ws dapat membuat *billing* sendiri melalui *website biller* (DJA, DJP, dan DJBC) dan membayar *billing* secara online kapan pun dan di mana pun (24/7). Dengan motto “Praktis, Cepat, dan Aman”, MPN G2 telah merevolusi sistem penerimaan negara elektronik di Indonesia sejak tahun 2014.

Pengembangan proses bisnis dan sistem MPN mencapai generasi ke-3 (MPN G3) sejak diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2019. MPN G3 sekaligus menandai komitmen DJPb bersinergi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya sebagai *biller* dan jaringan, yaitu DJA, DJP, DJBC, DJPPR, dan Setjen. MPN G3 disempurnakan dalam

tiga fiturnya, yaitu kapasitas, *interface*, dan kanal. Kapasitas MPN G3 dapat mencapai hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari semula hanya 60 transaksi per detik pada saat MPN G2. Kemudian dengan *interface* yang baru dalam MPN G3, wp/wb/ws cukup mengakses satu *website* saja, yaitu *mpn.kemenkeu.go.id* untuk membuat kode *billing* dan sekaligus dapat membayar kode *billing* dalam *website* yang sama secara *single sign on* (sso).

Kanal MPN G3 bertambah menjadi 10 jenis kanal, yaitu

teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*, EDC, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, *direct debit*, dan kartu kredit yang disediakan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya (LPL), seperti *fintech*, *e-Commerce*, *retailer*, penyedia jasa aplikasi perpajakan, serta lembaga lainnya selain Bank/ Pos Persepsi. Hingga saat ini, *Collecting Agent* yang bermitra adalah sebanyak 95 *Collecting Agent*, terdiri atas 83 Bank Persepsi, 1 Pos Persepsi, dan 11 LPL yaitu Tokopedia, Bukalapak, Finnet, Mitra Pajakku, *Online Pajak*, Indomaret, DANA, Bimasakti

| No. | MPN G3 | 30 November 2021 | | 30 November 2022 | | Naik/(Turun) 2021-2022 YoY | | | |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Transaksi | NomRpM | Transaksi | NomRpM | Transaksi | % Trx | NomRpM | % Nom |
| 1. | Pajak | 48.153.333 | 908.609 | 51.131.708 | 1.224.573 | 2.978.375 | 6 | 315.964 | 35 |
| 2. | PNBP | 23.805.391 | 231.279 | 29.765.964 | 301.956 | 5.960.573 | 25 | 70.677 | 31 |
| | Semua Jenis | 75.808.636 | 1.706.379 | 85.541.159 | 2.301.000 | 9.732.523 | 13 | 594.622 | 35 |

Sumber: *Dashboard* MPN online KPPN Khusus Penerimaan Kanwil DJPb DKI Jakarta Kementerian Keuangan s.d. 30 November 2022.

Multi Sinergi, Nebula, Clickargo, dan DOKU.

Berdasarkan *Dashboard* MPN online, penerimaan negara sampai dengan 30 November 2022 sebanyak 85 juta atau naik 10 juta transaksi dengan nominal Rp2.301 triliun atau naik sebesar Rp595

triliun. Pajak yang masuk ke Kas Negara meningkat 3 juta menjadi 51 juta transaksi dengan nominal meningkat Rp316 triliun menjadi Rp1.225 triliun. Adapun PNPB meningkat 6 juta menjadi 30 juta transaksi dengan nominal naik sebesar Rp71 triliun menjadi Rp302 triliun dibandingkan dengan tahun lalu.

| No. | MPN G3 | 30 November 2021 | | 30 November 2022 | | Naik/(Turun) 2021-2022 YoY | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Transaksi | NomRpM | Transaksi | NomRpM | Transaksi | % Trx | NomRpM | % Nom |
| 1. | Teller | 34.976.283 | 184.610 | 32.981.366 | 228.652 | (1.994.917) | (6) | 44.042 | 24 |
| 2. | Internet Banking | 20.616.602 | 957.336 | 25.234.910 | 1.330.717 | 4.618.308 | 22 | 373.381 | 39 |
| | Semua Kanal | 75.808.636 | 1.706.379 | 85.541.159 | 2.301.000 | 9.732.523 | 13 | 594.622 | 35 |

Sumber: *Dashboard* MPN online KPPN Khusus Penerimaan Kanwil DJPb DKI Jakarta Kementerian Keuangan s.d. 30 November 2022.

Dari 85 juta transaksi, wp/wb/ws menggunakan *teller* untuk 33 juta transaksi dan internet banking 25 juta transaksi. Dari Rp2.301 triliun ini, yang melalui *teller* Rp229 triliun, sedangkan internet banking digunakan wp/wb/ws hingga Rp1.331 triliun. Penerimaan Negara melalui *teller* turun 2 juta menjadi 33 juta transaksi dengan nominal naik Rp44 triliun menjadi Rp229 triliun, dan melalui internet banking naik 5 juta menjadi 25 juta transaksi dengan nominal naik Rp373 triliun menjadi Rp1.331 triliun s.d. 30 November 2022 dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan *outlook* APBN tahun 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp2.599 triliun, terdiri atas Pajak Rp1.715,6 triliun, Bea dan Cukai Rp314,9 triliun, dan PNBPNP Rp568,5 triliun. Hingga 30 November 2022, penerimaan negara melalui MPN G3 sebesar Rp2.301 triliun atau 88 persen dari target APBN, terdiri atas Pajak Rp1.224,6 triliun, Bea dan Cukai Rp637,2 triliun, PNBPNP Rp301,9 triliun, Pembiayaan Rp107,4 triliun, serta Penerimaan Negara Lainnya Rp29,8 triliun.

Untuk mengukur penerimaan negara berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, DJPb selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kepala KPPN Khusus Penerimaan Kanwil DJPb DKI Jakarta melakukan evaluasi dan penilaian kepatuhan dan kinerja efektivitas operasional penatausahaan transaksi penerimaan negara yang dilaksanakan Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya dengan *tools Collecting Agent Performance (CAP)*.

Penilaian kinerja *Collecting Agent* dengan CAP untuk memastikan kinerja *Collecting Agent* tetap dalam level terbaik, mendorong peningkatan kualitas layanan, dan memberikan penghargaan kepada *Collecting Agent* berkinerja terbaik. Penilaian CAP 2021 terhadap 93 *Collecting Agent* berdasarkan 3 indikator: kontribusi nominal, jumlah transaksi, dan kinerja operasional sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2021. Agar CAP 2021 dapat dibandingkan



antar-Collecting Agent dengan jenis usaha yang sama, 5 *Collecting Agent* berkinerja terbaik dibagi menjadi 5 kategori, yaitu BUMN, Bank Swasta, Bank Syariah, BPD, dan LPL. Diharapkan, CAP Award 2021 memotivasi untuk lebih meningkatkan kontribusi nominal ke Kas Negara, jumlah transaksi, dan kinerja operasional penatausahaan transaksi Penerimaan Negara melalui MPN.

Penganugerahan CAP Award 2021 menjadi momentum bahwa pendapatan negara dalam APBN telah berbasis kinerja sehingga *performance-based government revenues* menjadi *in line* dengan *performance-based budgeting* yang berbasis kinerja sejak tahun 2011 dan juga *in line*

dengan Pelaksanaan Anggaran Belanja APBN yang telah berbasis kinerja sejak tahun 2018 dengan *tools* Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga pengelola Belanja APBN.

Dengan *performance-based government revenues* melalui *tools* CAP yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Penerimaan Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan setiap tahun yang dikombinasikan dengan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Belanja APBN Kementerian Negara/ Lembaga berbasis kinerja atau *performance-based budgeting*, diharapkan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga makin berkualitas dengan tata kelola atau *good governance* yang lebih transparan dan akuntabel.

LAYANAN KONSUMEN

Target Penerimaan
Pajak Tercapai,
DJP Melanjutkan
Tantangan Akhir
Tahun 2022



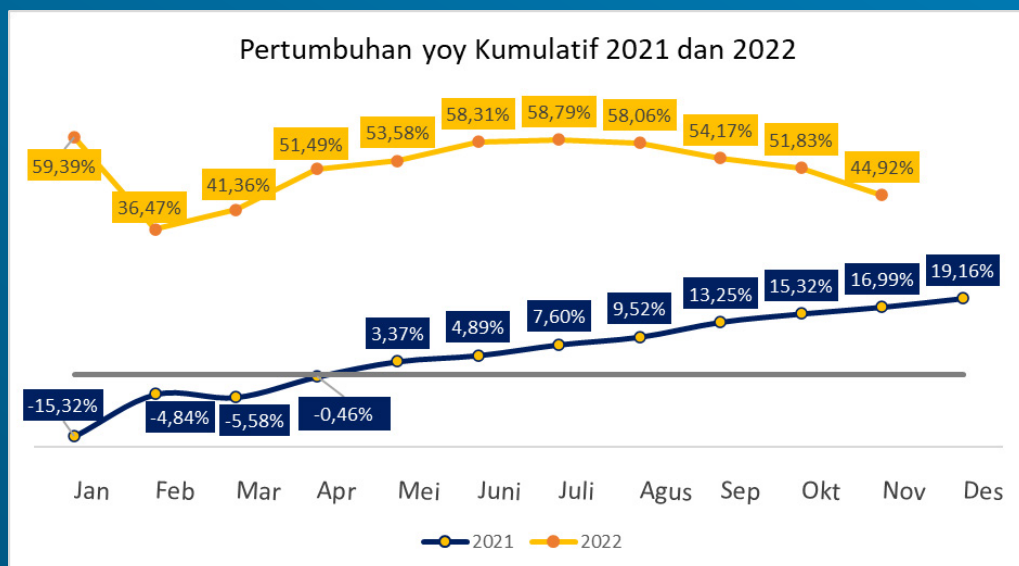
Penerimaan Pajak

Tepat pada bulan November 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengukir prestasi dengan mencapai target penerimaannya. Pada akhir bulan yang sama, kinerja penerimaan pajak mencapai 105,65 persen dari Target. Capaian yang solid sampai dengan November 2022, ditopang oleh empat faktor utama. Faktor utama tersebut antara lain pemulihan ekonomi, peningkatan harga komoditas

yang terjadi sejak tahun 2021, dampak dari pemberian insentif di bidang perpajakan, dan efek dari kebijakan pajak (Program Pengungkapan Sukarela/PPS, Penyesuaian tarif PPN, dan pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM)).

Tercapainya target penerimaan pajak pada periode November 2022 diiringi dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang masih kuat. Dari sisi pertumbuhan kumulatif, kinerja periode sampai dengan akhir

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

| Uraian | Target Perpres 98 2022 (Triliun) | Realisasi s.d. 30 November 2022 | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | Rp (Triliun) | $\Delta\%$ '21-'22 | % Realisasi |
| Pajak Penghasilan (PPH) | 813.68 | 924.84 | 53.97 | 113.66 |
| - Non Migas | 749.02 | 852.11 | 53.63 | 113.76 |
| - Migas | 64.66 | 72.73 | 58.14 | 112.49 |
| PPN & PPnBM | 638.99 | 615.95 | 35.76 | 96.39 |
| PBB | 20.90 | 21.32 | 19.05 | 102.01 |
| Pajak Lainnya | 11.38 | 6.76 | -34.44 | 59.42 |
| Jumlah | 1.484.96 | 1.568.87 | 44.92 | 105.65 |

November 2022 mencapai 44,92 persen (*yoy*). Capaian tersebut cenderung melandai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2022, pertumbuhan penerimaan pajak pada paruh kedua sudah mulai melambat imbas dari sumber-sumber penerimaan pajak yang tidak terulang kembali. Bila diperhatikan dari sisi pertumbuhan bulanan, periode ini merupakan kali yang pertama penerimaan pajak mengalami kontraksi sejak bulan April 2021.

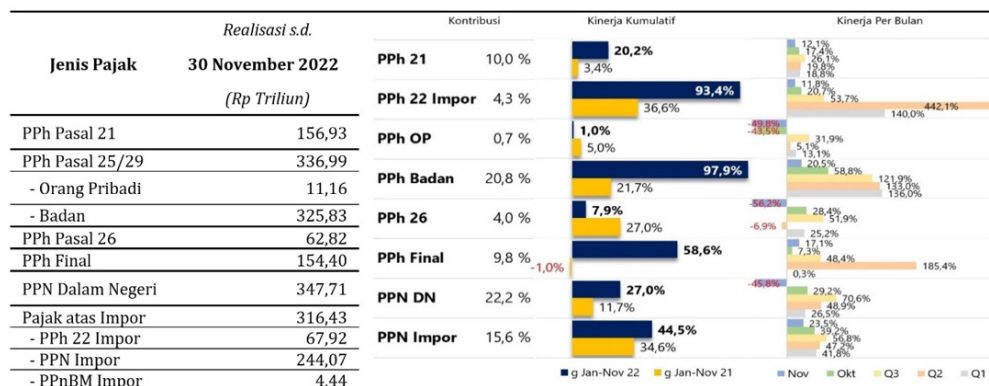
Jika dielaborasi berdasarkan kelompok pajak, kinerja penerimaan sampai dengan November 2022 nampaknya juga mulai melandai, namun masih dalam *range* pertumbuhan *double digits*. Eloknya kinerja pertumbuhan di atas 50 persen dijumpai pada kelompok pajak PPh Non Migas dan PPh Migas. Sepadan dengan kelompok pajak PPh, pajak atas konsumsi yaitu PPN dan PPnBM juga tumbuh baik mencapai 35,76 persen (*yoy*). Adapun capaian dari pajak atas konsumsi tersebut sudah tidak sekuat periode sebelumnya karena dampak dari melonjaknya restitusi pada November 2022.

Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak

Mayoritas kinerja per jenis pajak mengalami pertumbuhan kumulatif positif, namun kinerja bulanan berkata sebaliknya. Secara lebih detail, pertumbuhan kumulatif dari seluruh jenis pajak mencapai *double digits*, kecuali PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 26. Jika diurutkan berdasarkan pertumbuhan kumulatif teratas, PPh Badan menjadi jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi mendekati 100 persen (*yoy*), atau lebih tepatnya mencapai 97,85 persen (*yoy*). Secara bulanan, kinerja PPh Badan mengalami perlambatan 20,52 persen (*yoy*). Perlambatan kinerja PPh Badan merupakan akibat dari ketetapan pajak pada bulan November 2021 yang tidak berulang pada tahun ini.

Beriringan dengan PPh Badan, kinerja pajak atas impor juga mengalami pertumbuhan kumulatif yang kuat. Namun secara bulanan, pertumbuhan jenis pajak ini mengalami tekanan. Pertumbuhan kumulatif PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor berturut-turut adalah 93,42 persen (*yoy*), 44,50 persen (*yoy*), dan 44,95 persen (*yoy*). Capaian kinerja pajak atas impor ditopang oleh Nilai Impor yang masih terjaga

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



pada periode ini. Berikutnya, kinerja jenis pajak dengan pertumbuhan kumulatif yang juga memuaskan adalah PPh Final. Jenis pajak ini tumbuh positif disokong oleh peningkatan setoran pajak atas persewaan tanah dan/atau bangunan, serta penguatan penjualan saham. Sampai dengan November 2022, pertumbuhan PPh Final mencapai 58,63 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan bulanan jenis pajak ini menguat hingga 17,13 persen (yoy).

Selain jenis pajak yang telah disebutkan sebelumnya, jenis pajak PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri (DN) membukukan pertumbuhan kumulatif yang cukup baik. Namun, kedua jenis pajak tersebut mengalami tekanan pada pertumbuhan bulanan. PPN DN tumbuh 27,02 persen (yoy) secara kumulatif, dan tertekan 45,76 persen (yoy) secara bulanan. Tekanan yang

tinggi pada pertumbuhan jenis pajak PPN DN merupakan dampak dari restitusi yang melonjak tinggi pada periode ini. Sedangkan jenis pajak PPh Pasal 21 secara kumulatif tumbuh 20,23 persen (yoy) dan 12,05 persen (yoy). Terakhir, PPh Pasal 26 tumbuh terbatas 7,91 persen (yoy) dan tertahan 56,18 persen (yoy). Tertekannya jenis pajak PPh Pasal 26 merupakan akibat dari penurunan pembayaran atas Valuta Asing yang Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kinerja Penerimaan Sektoral

Selaras dengan kinerja per jenis pajak, kinerja sektoral mayoritas mengalami pertumbuhan kumulatif yang impresif, namun mengalami perlambatan pada pertumbuhan bulanan. Perlambatan tersebut merupakan efek dari restitusi yang melonjak pada periode ini. Sektor yang sangat terdampak

dari peningkatan restitusi pada November 2022 merupakan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan. Bahkan, Sektor Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi pada periode ini. Sektor ini tumbuh 38,05 persen (yoy), namun mengalami pertumbuhan negatif 2,46 persen (yoy).

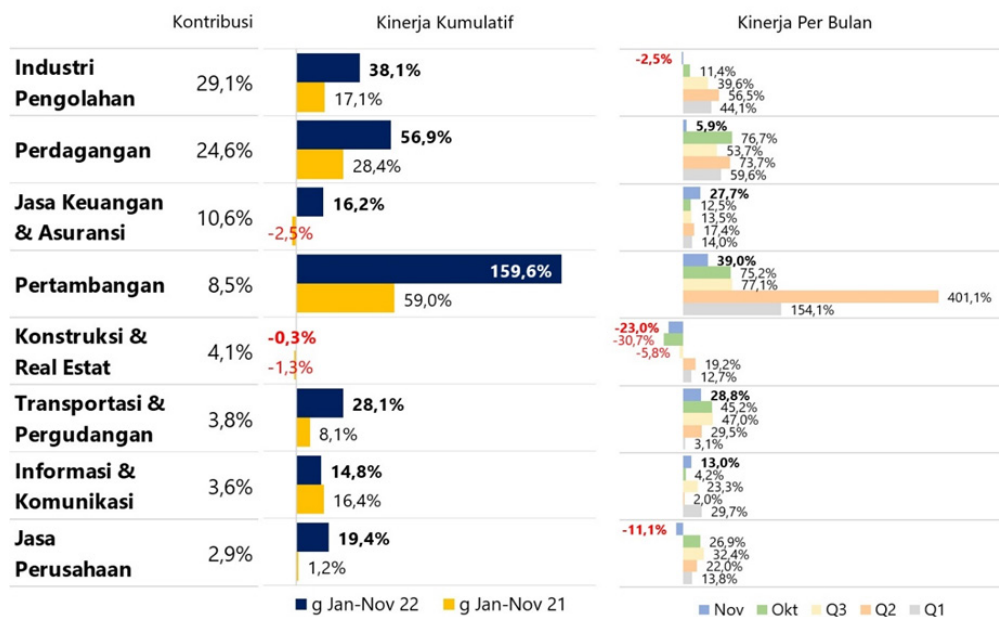
Selain restitusi, perlambatan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan juga merupakan imbas dari tidak berulangnya pembayaran ketetapan pajak yang terjadi pada tahun lalu. Setali tiga uang dengan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan juga mengalami tekanan pada pertumbuhan bulanan, namun masih dalam zona hijau. Pertumbuhan Sektor Perdagangan secara kumulatif mencapai 56,93 persen (yoy) dan 5,86 persen (yoy) secara bulanan.

Berikutnya, sektor yang menjadi primadona yaitu Sektor Pertambangan masih tumbuh kuat 159,56 persen (yoy). Namun pertumbuhan bulanan dari Sektor Pertambangan sudah tidak sekuat periode sebelumnya. Penopang utama sektor ini adalah harga komoditas yang masih berada di puncaknya, sehingga penerimaan pajak di Sektor Pertambangan juga ikut terakselerasi. Berpadanan dengan Sektor Pertambangan,

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan positif baik secara kumulatif maupun bulanan. Adapun pertumbuhan kumulatif dari sektor-sektor tersebut secara berurutan adalah 16,21 persen (yoy), 28,13 persen (yoy), dan 14,81 persen (yoy). Selaras dengan pertumbuhan kumulatifnya, ketiga sektor tersebut mengalami penguatan pada pertumbuhan bulanan kecuali pada Sektor Transportasi dan Pergudangan.

Terakhir, terdapat dua Sektor yang mengalami tekanan yang cukup dalam yaitu Sektor Konstruksi dan *Real Estate* dan Sektor Jasa Perusahaan. Sektor Konstruksi dan *Real Estate* menjadi sektor yang mengalami deselerasi baik dari sisi kumulatif maupun bulanan. Sektor Konstruksi dan *Real Estate* secara kumulatif tumbuh negatif 0,32 persen (yoy) dan melambat 23,02 persen (yoy) secara bulanan. Tertekannya Sektor Konstruksi dan *Real Estate* merupakan dampak dari perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah yang semula dipungut oleh Bendahara atas nama Wajib Pajak (WP) Rekanan menjadi atas nama Bendahara/ Platform yang diatur dengan PMK-58 dan PMK-59 tahun

Penerimaan Pajak Sektoral



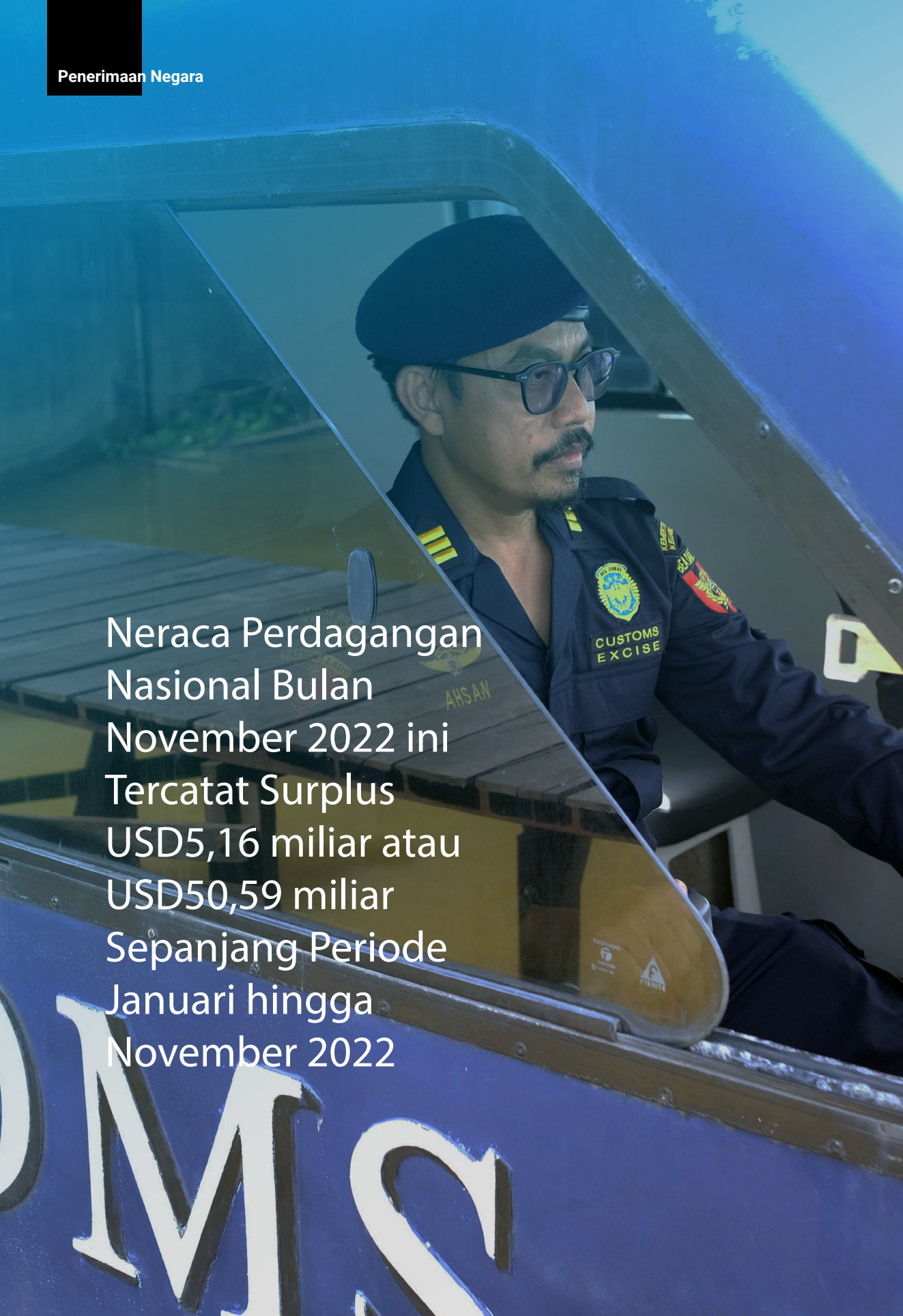
Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas

*Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan

2022. Selanjutnya, Sektor Jasa Perusahaan secara kumulatif tumbuh 19,36 persen (yoy) dan tertekan 11,10 persen (yoy) secara bulanan. Sektor dengan kontribusi terkecil ini melambat akibat dari meningkatnya restitusi dan berkurangnya pembayaran dividen pada periode ini.

Halaman Ini Dikosongkan

Neraca Perdagangan
Nasional Bulan
November 2022 ini
Tercatat Surplus
USD5,16 miliar atau
USD50,59 miliar
Sepanjang Periode
Januari hingga
November 2022



Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan November 2022 masih menunjukkan kinerja yang memuaskan. Surplus mencapai USD5,16 miliar dan melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu, pada bulan Juni 2020. Meskipun menurun dibanding bulan sebelumnya, surplus ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tingginya surplus NP disebabkan kinerja ekspor yang masih positif diikuti dengan penurunan impor.

Surplus terjadi pada neraca nonmigas dan defisit pada neraca migas. Kinerja positif neraca nonmigas, ditopang oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, bijih tembaga, produk kelapa sawit dan jagung. Selain

itu dari sisi manufaktur berupa olahan logam dan kendaraan. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih berlanjut terutama dikontribusikan oleh impor bensin dan minyak bumi.

Ekspor masih tumbuh dibandingkan tahun lalu namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor bulan November 2022 masih mengalami pertumbuhan sebesar 5,58 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekspor terjadi, terutama pada sektor yang berasal dari industri pengolahan dan pertambangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan Oktober 2022, ekspor cenderung melambat, turun 2,46 persen (*mtm*). Hal ini terutama terjadi pada ekspor minyak goreng dan batubara.

Realisasi Penerimaan Kepabebean dan Cukai

| No. | Jenis Penerimaan | Target Perpres 98 | Realisasi | | Growth (y-o-y, %) | | % Capaian |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| 1 | BEA MASUK | 42.34 | 34.37 | 45.79 | 18.25% | 33.22% | 108.14% |
| 2 | CUKAI | 220.00 | 167.51 | 195.74 | 10.84% | 16.86% | 88.97% |
| | Hasil Tembakau | 209.91 | 161.69 | 188.44 | 10.73% | 16.54% | 89.77% |
| | Ethil Alkohol | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -55.22% | 12.87% | 89.38% |
| | MMEA | 6.86 | 5.62 | 7.12 | 17.31% | 26.69% | 103.85% |
| | Denda Adm. Cukai | - | 0.06 | 0.04 | 19.52% | -34.20% | - |
| | Cukai Lainnya | - | 0.02 | 0.02 | 94.60% | -6.50% | - |
| | Plastik & MBDK | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | BEA KELUAR | 36.69 | 30.38 | 38.69 | 819.49% | 27.34% | 105.45% |
| | TOTAL | 299.03 | 232.25 | 280.22 | 26.58% | 20.65% | 93.71% |
| | PPN Impor | | 168.91 | 244.07 | 34.59% | 44.50% | |
| | PPn BM Impor | | 3.06 | 4.44 | 9.05% | 44.95% | |
| | PPh Pasal 22 Impor | | 35.11 | 67.92 | 36.57% | 93.42% | |
| | Total PDRI lainnya | | 207.09 | 316.43 | 34.46% | 52.80% | |
| | TOTAL DJBC + PERPAJAKAN | | 439.34 | 596.65 | 30.17% | 35.81% | |

(Angka dalam Triliun Rupiah). Sumber: DJPB 5 Desember 2022

Pertumbuhan ekspor bulan November 2022 hanya terjadi pada sektor nonmigas. Kinerja sektor nonmigas masih konsisten tumbuh, kali ini mencapai 6,88 persen (*yoy*). Pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan CPO, yang masing-masing tumbuh 26,69 persen (*yoy*) dan 549,23 persen (*yoy*). Sedangkan ekspor dari sektor migas turun 15,23 persen (*yoy*). Penurunan ini dikontribusi oleh penurunan ekspor gas alam dan buatan ke Singapura serta ekspor Minyak Bumi ke Thailand.

Berbeda dengan ekspor, kinerja impor mulai menurun pada bulan November. Impor mengalami penurunan tipis dibandingkan tahun lalu. Impor turun 1,89 persen (*yoy*) baik dari sektor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 7,30 persen (*yoy*). Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh penurunan volume impor bensin, solar dan gas alam. Selain itu, harga minyak dunia juga sudah mulai termoderasi. Sedangkan impor nonmigas turun 0,89 persen (*yoy*). Penurunan terjadi karena melemahnya importasi besi baja dan resin sintesis.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk

(BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 30 November 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp280,22 triliun atau 93,71 persen dari Pagu. Penerimaan ini meningkat 20,65 persen (*yoy*) didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan. Komponen penerimaan cukai merupakan kontributor pertumbuhan terbesar, kemudian diikuti BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya juga mengalami kinerja yang memuaskan. Penerimaan ini mencapai Rp316,43 triliun atau tumbuh 52,80 persen (*yoy*). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp596,65 triliun atau tumbuh sebesar 35,81 persen (*yoy*).

Dari sisi penerimaan, kinerja BM masih positif dan capaiannya sudah mencapai 108,14 persen dari Target. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan 32,12 persen (*yoy*) atau senilai Rp45,79 triliun. Kinerja memuaskan ini tidak lepas dari kondisi impor nasional yang secara akumulatif masih meningkat. Terutama dari importasi kendaraan, suku cadang, dan barang logam pra-pabrikasi yang meningkat cukup

signifikan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi indikasi sudah membaiknya aktivitas ekonomi, industri dan investasi.

Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan cukai mencapai Rp195,74 triliun atau 88,97 persen dari Target atau tumbuh 16,86 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Hal tersebut sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

Kemudian untuk penerimaan Cukai HT hingga akhir November 2022 tumbuh 19,15 persen (*yoy*), mencapai Rp195,74 triliun. Hal ini berarti Pagu telah tercapai 88,97 persen. Kinerja ini didukung oleh efektivitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau

Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai, per bulan November 2022, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar 1,7 persen (*yoy*), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Penerimaan cukai MMEA juga masih tumbuh *double digits*, seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini pertumbuhannya mencapai 26,69 persen (*yoy*) atau senilai Rp7,12 triliun. Sehingga penerimaan cukai MMEA telah mencapai 103,8 persen dari Target. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Produksi MMEA dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan, sebesar 98,2

persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan cukai EA juga masih mengalami pertumbuhan, mencapai Rp116,20 miliar atau 89,38 persen dari Target atau tumbuh 12,50 persen (*yoy*). Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Penerimaan BK mencapai Rp37,83 triliun atau 103,12 persen Target. Kinerja tersebut masih tumbuh signifikan, mencapai 27,34 persen (*yoy*). Peningkatan tersebut dikontribusi oleh ekspor produk kelapa sawit dan tembaga. Penerimaan komoditas CPO dan turunannya tumbuh 23,39 persen (*yoy*), terutama karena tarif bea keluar yang tinggi awal tahun, kemudian diikuti perubahan tarif pada bulan Juni dan kebijakan *flush out*. Sedangkan dari komoditas tembaga, tumbuh 62,55 persen (*yoy*) didukung peningkatan volume ekspor tembaga.



Pendapatan
Pertambangan Mineral
dan Batubara Menjadi
Kontributor Utama
PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan negara hingga periode 30 November 2022 masih menunjukkan kinerja yang positif. Penerimaan dari Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan di atas 20 persen. Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp527,25 triliun. Realisasi ini lebih besar 109,47 persen dari Target. Capaian tersebut tumbuh 37,83 persen (yoy), lebih tinggi dari capaian

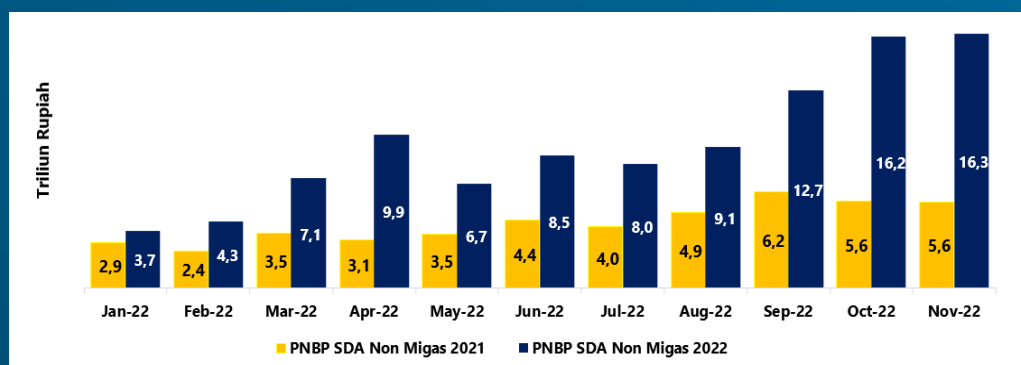
tahun lalu 25,43 persen. Kontribusi kenaikan harga komoditas di pasaran yang tumbuh signifikan mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp238,52 triliun atau 105,30 persen dari Pagu. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp136,07 triliun,

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

| PNBP (Miliar Rupiah) | APBN 2022 (Perpres 98/2022) | Realisasi s.d. 30 Nov 2022 | % APBN | % Growth (YoY) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 481.631,10 | 527.251,55 | 109,47 | 37,83 |
| A Pendapatan SDA | 226.518,50 | 238.522,36 | 105,30 | 89,34 |
| 1 Migas | 139.098,41 | 136.075,78 | 97,83 | 70,20 |
| a Minyak Bumi | 106.487,89 | 108.695,26 | 102,07 | 73,92 |
| b Gas Bumi | 32.610,52 | 27.380,52 | 83,96 | 56,87 |
| 2 Nonmigas | 87.420,09 | 102.446,59 | 117,19 | 122,61 |
| a Pendapatan Pertambangan Minerba | 78.871,29 | 94.877,28 | 120,29 | 140,31 |
| b Pendapatan Kehutanan | 5.241,15 | 4.948,70 | 94,42 | 7,96 |
| c Pendapatan Perikanan | 1.686,56 | 1.014,61 | 60,16 | 81,05 |
| d Pendapatan Panas Bumi | 1.621,09 | 1.606,01 | 99,07 | 15,04 |
| B Pendapatan KND | 37.089,85 | 40.595,93 | 109,45 | 33,12 |
| C Pendapatan PNBP Lainnya | 112.221,73 | 173.150,11 | 154,29 | 40,62 |
| D Pendapatan BLU | 105.801,01 | 74.983,15 | 70,87 | (27,17) |

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulanan SDA Nonmigas Tahun 2021 - 2022



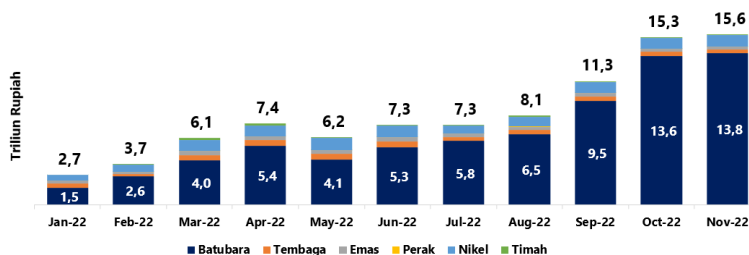
serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp102,45 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 November 2022 tumbuh sebesar 89,34 persen (*yoy*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 41,92 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), mineral, dan batubara.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 30 November 2022 sebesar Rp136,07 triliun atau mencapai 97,83 persen dari Target. Realisasi ini tumbuh sebesar 70,20 persen (*yoy*), lebih tinggi dari tahun 2021 yang tumbuh 24,65 persen. Rata-rata ICP bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar USD100,09 per barel atau naik 49,77 persen (*yoy*). Adapun rata-rata *lifting* minyak bumi bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar 607,24 ribu barel per hari atau turun 8,33 persen (*yoy*). Demikian pula, rata-rata *lifting* gas bumi bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar 951,23 ribu barel setara minyak per hari atau turun 4,49 persen (*yoy*). Kenaikan rata-rata ICP periode bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022

mengkompensasi penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2022. Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 30 November 2022 mencapai Rp102,45 triliun atau 117,19 persen dari Pagu. Capaian ini tumbuh sebesar 122,61 persen (*yoy*), lebih tinggi dari tahun 2021 yang tumbuh 86,89 persen. Dalam tahun 2022, mulai bulan Januari 2022 terjadi peningkatan pendapatan SDA Nonmigas yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mendominasi pendapatan SDA Nonmigas dibandingkan dengan sektor lainnya (Kehutanan, Perikanan, dan Panas Bumi). Adapun Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Batubara menjadi kontributor utama yang menyumbang kenaikan pendapatan dari Sektor Pertambangan Minerba dibandingkan dengan mineral lainnya.

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 140,31 persen. Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai

Komposisi Pendapatan Royalti Minerba Per Bulan Tahun 2022



dengan November 2022 sebesar USD276,1 per ton yang mengalami kenaikan 134,0 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar USD118 per ton. Di samping masih tingginya harga batubara, faktor utama tingginya realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba adalah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang baru pada PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 30 November 2022 mencapai Rp4,95 triliun atau 94,42 persen dari Target. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,96 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh produksi kayu dan pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang hingga 30 November 2022 terealisasi sebesar Rp745,52 miliar.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor

Perikanan hingga 30 November 2022 mencapai Rp1,01 triliun atau 60,16 persen dari Target. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 81,05 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan utamanya disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, serta adanya kenaikan penerbitan perizinan.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp1,61 triliun atau 99,07 persen dari Target. Capaian ini tumbuh 15,04 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power, adanya pembayaran atas tindak

lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP, serta penurunan besaran pencadangan saldo reimbursement PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah).

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp40,60 triliun atau 109,45 persen dari Target. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 33,12 persen (yoy). Tingginya kinerja Pendapatan KND hingga bulan Oktober 2022 utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga 30 November 2022 mencapai Rp24,58 triliun atau tumbuh 80,9 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan PNBPLainnya hingga 30 November 2022 mencapai Rp173,15 triliun atau 154,29 persen dari Target. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 40,62 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBPLainnya disumbang terutama dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp65,89 triliun atau tumbuh 142,38 persen (yoy). Di samping itu, juga disumbang dari Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang mencapai Rp10,07 triliun atau tumbuh 539,79 persen (yoy). Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang

dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga antara lain layanan administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor) tumbuh 102,9 persen (yoy), Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing tumbuh 70,4 persen (yoy), dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian tumbuh 8,2 persen (yoy).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp74,98 triliun atau 70,87 persen dari Target. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 27,17 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit s.d 30 November 2022 sebesar Rp30,22 triliun atau turun 48,4 persen (yoy) yang terealisasi Rp58,59 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit antara lain dampak kebijakan pelarangan ekspor dan adanya peneanaan tarif USD0,- yang mulai diberlakukan sejak 15 Oktober 2022. Di samping itu, penurunan pendapatan BLU juga diakibatkan adanya penurunan Pendapatan Pendapatan Klaim BPJS.

HANYA UNTUK

MASYARAKAT MISKIN

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) utamanya untuk Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan November 2022 mencapai Rp1.882,64 triliun atau 81,80 persen dari Pagu. Realisasi tersebut terutama untuk pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi dan kompensasi, serta penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp877,82 triliun atau 92,82 persen dari Pagu. Realisasi Belanja K/L ini terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan Gaji ke-13, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan

peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bansos, serta penyaluran berbagai program PEN.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp229,98 triliun atau 86,40 persen dari Pagu. Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI termasuk Gaji ke-13 dan THR. Realisasi tersebut meningkat sebesar 3,04 persen (*yoy*). Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50,00 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai Peraturan Pemerintah No. 16/2022.

Realisasi Belanja Barang mencapai Rp341,54 triliun atau 101,06 persen dari Pagu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

| Belanja Pemerintah Pusat | Perpres 98/2022 | Realisasi s.d November | % thd APBN | % Growth (yoy) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Belanja K/L | 945,75 | 877,82 | 92,82 | (6,35) |
| Belanja Pegawai | 266,18 | 229,98 | 86,40 | 3,04 |
| Belanja Barang | 337,94 | 341,54 | 101,06 | (16,48) |
| Belanja Modal | 199,20 | 153,08 | 76,85 | (4,54) |
| Bantuan Sosial | 142,43 | 153,22 | 107,58 | 5,81 |
| Belanja Non-K/L | 1.355,89 | 1.004,82 | 74,11 | 51,78 |
| a.l. Belanja Pegawai | 160,34 | 142,62 | 88,94 | 3,15 |
| Subsidi | 283,66 | 205,90 | 72,59 | 25,27 |
| Total Belanja Pemerintah Pusat | 2.301,64 | 1.882,64 | 81,80 | 17,72 |

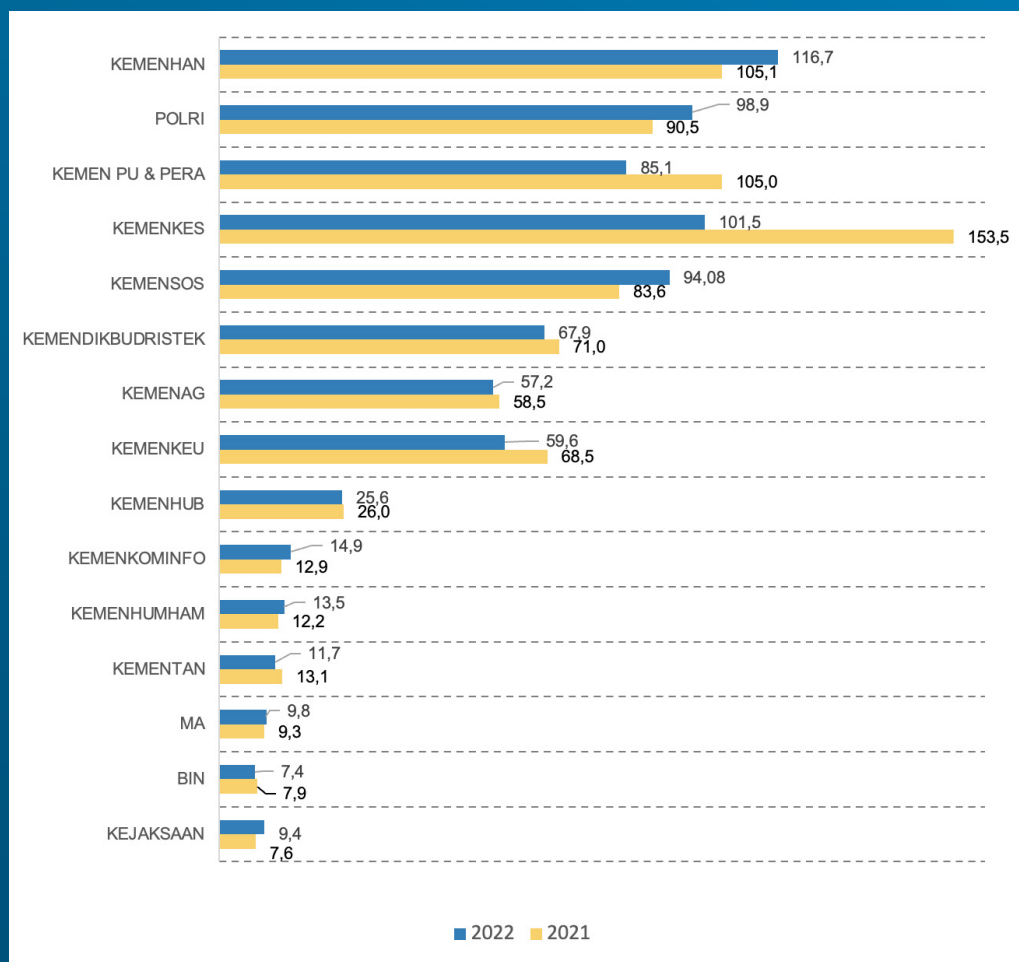
(Angka dalam Triliun Rupiah)

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 16,48 persen (yoy). Penurunan tersebut memberikan indikasi bahwa dampak penanganan pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, salah satunya ditunjukkan oleh realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan yang lebih tinggi di tahun 2021 menjadi lebih rendah di tahun 2022. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang tidak dilanjutkan di tahun 2022. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang hingga November tahun 2022 terutama digunakan untuk berbagai program/kegiatan yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (PKLWN), penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Di sisi lain, realisasi anggaran belanja barang juga dipergunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat reguler (selain penanganan dampak pandemi Covid-19), antara lain Bantuan Operasional Siswa (BOS), penugasan pada BLU yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola

Dana Pendidikan (LPDP), kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya. Program penanganan dampak pandemi Covid-19 maupun program yang bersifat reguler tersebut dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan November 2022 mencapai Rp153,08 triliun atau 76,85 persen dari Pagu. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 4,54 persen (yoy). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan relaksasi dari pembayaran proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta lanjutan proyek MYC untuk pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dan di bayarkan pada awal tahun 2021 sehingga menyebabkan realisasi belanja modal tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2022. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 30 November 2022



TA 2021-2022 (Angka dalam Triliun Rupiah)

dibanding tahun 2021 dan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 7,88 persen. Realisasi sampai dengan November 2022 terutama berasal dari :

- (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan; (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub; (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan POLRI, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR dan Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama.

Realisasi Bansos sampai dengan November 2022 mencapai Rp153,22 triliun atau 107,6 persen dari Pagu. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh adanya tambahan alokasi pada Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan BLT BBM. Realisasi sampai dengan November tersebut juga tumbuh 5,81 persen (*yoy*). Adapun pemanfaatan belanja tersebut antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap

I, II, III dan IV kepada 10 juta PKH; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,7 juta keluarga; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM tahap I dan II kepada 20,65 juta KPM; (5) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN bulan Januari hingga November bagi 96,47 juta jiwa; serta (6) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 20,1 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 836,6 ribu mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan akhir November 2022 terutama disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 88,11 persen dari total realisasi. Serapan tersebut terutama didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, POLRI, dan Kementerian Sosial. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan persenjataan pada Kemenhan dan POLRI, penanganan pasien Covid-19 dan program pelaksanaan vaksinasi pada Kemenkes, penyaluran berbagai bantuan

sosial pada Kemensos, serta pembayaran selisih harga biodiesel yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU BDPKKS. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 November 2022 mencapai Rp1.004,82 triliun atau 74,11 persen dari Pagu atau tumbuh 51,78 persen (yoy). Realisasi tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp142,62 triliun atau 88,94 persen terhadap Pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13), serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp205,90 triliun, sebesar 72,59 persen dari Pagu atau naik sebesar 25,27 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi sebesar Rp148,15 triliun, mencakup

Subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg serta Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp57,75 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi tahun 2022 di antaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 31 Oktober 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 14,91 juta KL, LPG tabung 3 Kg mencapai 6,44 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,81 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 52,45 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 30 November 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 6,88 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 7,01 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp336,26 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 189,24 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp288,53 triliun. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM

dan listrik mencapai Rp268,13 triliun, meliputi pembayaran atas tagihan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2022 dalam rangka menjaga ketersediaan energi yang terjangkau masyarakat. Selain itu, realisasi juga dimanfaatkan untuk Program Kartu Prakerja yang mencapai Rp17,91 triliun, terutama untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi kepada 5,08 juta peserta Kartu Prakerja tahun 2022.



**Realisasi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
(TKD) Hingga
30 November
2022 Mencapai
Rp731,72 Triliun**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan 30 November 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) telah disalurkan sebesar **Rp731,72 triliun** atau 90,92 persen dari Pagu, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp668,41 triliun atau 90,72 persen dari Pagu dan Dana Desa sebesar Rp63,31 triliun atau 93,10 persen dari Pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,91 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Hingga akhir November 2022, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) telah mencapai Rp117,75 triliun atau 83,85 persen dari Pagu. Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 44,23 persen (yoy) yang dipengaruhi adanya penyaluran Sebagian Kurang Bayar DBH. PMK tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH definitif telah ditetapkan melalui PMK nomor 127/PMK.07/2022 yaitu sebesar

Rp41,87 triliun. Kurang Bayar DBH sebesar Rp22,89 triliun telah disalurkan pada bulan lalu, dan sisanya direncanakan akan diselesaikan seluruhnya pada tahun 2022. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 lebih tinggi Rp38,15 triliun dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp56,70 triliun.

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) per 30 November 2022 sebesar Rp369,03 triliun atau 97,63 persen dari Pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,05 persen (*yoy*) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan hingga 30 November 2022 sebesar Rp42,49 triliun atau 69,78 persen dari Pagu, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,05 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan adanya surat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, hal lain yang menyebabkan peningkatan penyaluran dibandingkan tahun lalu yaitu adanya perpanjangan

batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Adanya pelaksanaan sosialisasi terkait reuiu APIP dalam penyaluran DAK Fisik pada tahun 2021, sehingga APIP lebih memahami tupoksi dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2022. Selanjutnya hal yang mempengaruhi peningkatan penyaluran DAK Fisik yaitu adanya surat Dirjen Perimbangan Keuangan perihal percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2022.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik hingga 30 November 2022 telah mencapai Rp111,90 triliun atau 86,94 persen dari Pagu. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 9,07 persen (*yoy*) yang dikarenakan adanya perhitungan sisa dana BOS 2020 dan 2021 pada penyaluran tahap 2 dan tahap 3 untuk memaksimalkan sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah. Selain itu,

terdapat penurunan realisasi TPG dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh lebih sedikitnya laporan pemda yang disampaikan sebagai syarat penyaluran dibandingkan dengan tahun lalu. Rendahnya laporan yang disampaikan tersebut karena daerah sedang melakukan proses pembayaran kepada guru dan proses rekonsiliasi antara BPKAD dan Dinas Pendidikan terkait dengan data guru yang memenuhi syarat untuk dapat dibayarkan TPG.

Dana Insentif Daerah (DID)

Sampai dengan 30 November 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya telah disalurkan sebanyak Rp3,99 triliun atau 99,84 persen dari Pagu sebesar Rp4,00 triliun yang dialokasikan untuk 383 Pemda. Persentase realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 99,74 persen (*yoy*) dari pagu alokasi DID yang ditetapkan dalam Perpres No. 113 Tahun 2020. Selain itu, berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2022, terdapat pagu DID atas kinerja tahun berjalan sebesar Rp3,00 triliun, dimana Rp1,50 triliun di antaranya telah disalurkan kepada 125 pemda penerima alokasi sebagaimana ditetapkan melalui PMK No. 140 Tahun 2022. Sehingga secara total, DID tahun 2022 telah berhasil disalurkan sebesar Rp5,49 triliun atau 78,48 persen dari Pagu.

Adapun pengalokasian DID atas kinerja tahun berjalan periode II dengan pagu sebesar Rp1,50 triliun telah ditetapkan melalui PMK No. 170 tahun 2022 pada bulan November 2022. Penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode II akan dilakukan secara sekaligus kepada 107 Pemda provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi sebagaimana diatur dalam PMK tersebut.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Per 30 November 2022, penyaluran Dana Otonomi Khusus telah seluruhnya disalurkan atau sebesar Rp20,44 triliun. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 23,18 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus melalui PMK nomor 76/PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya, waktu paling akhir penyaluran Dana Otsus di Bulan November serta penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke masing-masing RKUD provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah Papua. Selanjutnya, untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta juga telah disalurkan seluruhnya atau sebesar Rp1,32 triliun. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Realisasi TKD Tahun Anggaran 2021-2022

| Uraian | 2021 | | 2022 | | % thd APBN |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | |
| Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 795.479,48* | 711.039,07 | 804.780,47 | 731.721,82 | 90,92 |
| Transfer ke Daerah | 723.479,48 | 646.528,26 | 736.780,47 | 668.414,27 | 90,72 |
| A. Dana Perimbangan | 688.676,56 | 615.153,83 | 708.024,21 | 641.164,34 | 90,56 |
| 1. Dana Transfer Umum | 492.253,01 | 450.466,47 | 518.430,37 | 486.775,05 | 93,89 |
| a. Dana Bagi Hasil | 101.961,62 | 81.640,94 | 140.430,37 | 117.748,28 | 83,85 |
| b. Dana Alokasi Umum | 390.291,39 | 368.825,53 | 378.000,00 | 369.026,77 | 97,63 |
| 2. Dana Transfer Khusus | 196.423,55 | 164.687,36 | 189.593,84 | 154.389,29 | 81,43 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 65.248,20 | 41.623,89 | 60.874,00 | 42.490,01 | 69,78 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 131.175,35 | 123.063,47 | 128.719,84 | 111.899,28 | 86,94 |
| B. Dana Insentif Daerah | 13.500,00 | 13.464,28 | 7.000,00 | 5.493,67 | 78,48 |
| C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY | 21.302,92 | 17.910,15 | 21.756,26 | 21.756,26 | 100,00 |
| 1. Dana Otsus | 19.982,92 | 16.590,15 | 20.436,26 | 20.436,26 | 100,00 |
| a. Provinsi Papua dan Papua Barat | 7.805,83 | 6.989,14 | 8.505,00 | 8.505,00 | 100,00 |
| b. Provinsi Aceh | 7.805,83 | 5.666,87 | 7.560,00 | 7.560,00 | 100,00 |
| c. Dana Tambahan Infrastruktur | 4.371,26 | 3.934,14 | 4.371,26 | 4.371,26 | 100,00 |
| 2. Dana Keistimewaan D.I.Y | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00 |
| Dana Desa | 72.000,00 | 64.510,82 | 68.000,00 | 63.307,55 | 93,10 |

Tanggal 1 – 30 November 2022 (Angka dalam Miliar Rupiah)

B. DANA DESA

Realisasi Dana Desa sampai dengan akhir November 2022 telah mencapai Rp63,31 triliun atau 93,10 persen dari Pagu atau naik 89,60 persen (*yoy*) dari pagu alokasi DID yang ditetapkan dalam Perpres No. 113 Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas

desa sebesar Rp25,37 triliun kepada 7,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.934 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp5,76 triliun atau 37,00 persen (*yoy*). Hal ini dikarenakan, Pemerintah memberikan relaksasi terkait kebijakan pemberian BLT Desa melalui PMK Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dimana salah satunya bahwa KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal

Pembiayaan Utang

Kinerja APBN hingga akhir November 2022 mengalami defisit sebesar Rp236,86 triliun atau 1,21 persen terhadap PDB. Sementara realisasi pembiayaan utang hingga November 2022 mencapai Rp510,22 triliun atau 54,07 persen dari Pagu. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 22,78 persen (yoy). Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan

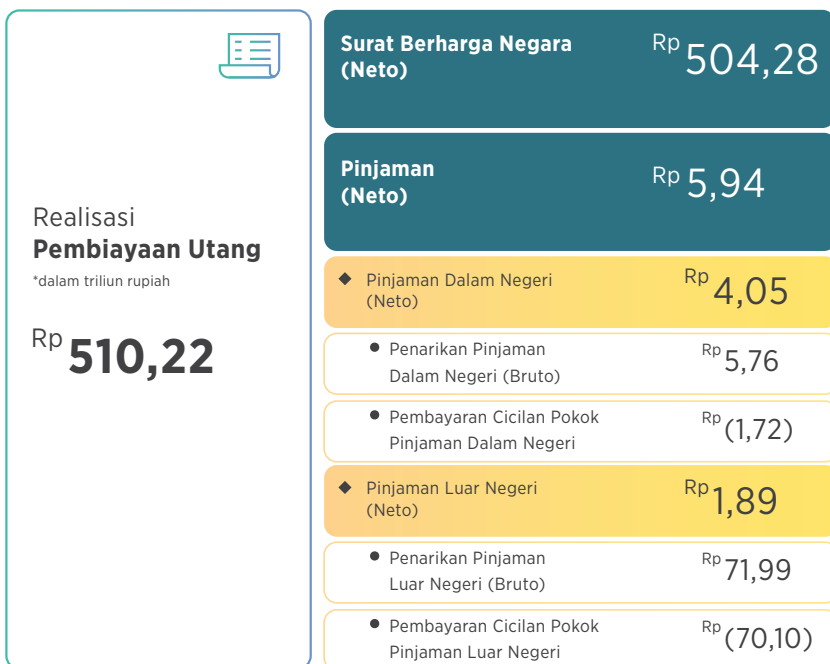
penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan dari sisi pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp504,28 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp5,94 triliun.

Pembiayaan Utang

per 30 November 2022

Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.



Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,76 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,72 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp71,99 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp70,10 triliun.

Selama bulan November, Pemerintah masih melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada tanggal 1, 8, 15, 22 dan 29 November 2022. Lelang reguler dilakukan secara bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pada tanggal 2 November 2022, Pemerintah melakukan lelang SBSN tambahan (*Green Shoe Option/GSO*), serta SBSN secara *private placement* pada 7 November 2022. Pemerintah juga telah menerbitkan SBSN dengan cara *private placement* dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 24 November 2022 dengan jumlah sebesar Rp0,25 triliun. Dalam rangka pengelolaan portofolio SBN, Pemerintah telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran (*Debt Switch*) pada 17 November 2022.

Penerbitan SBN Ritel tahun 2022 telah selesai dilakukan seiring dengan ditetapkannya hasil penjualan Sukuk Tabungan (ST)

seri ST009 pada awal Desember 2022. ST-009 sebagai penutup SBN Ritel tahun ini mencatatkan beberapa capaian positif, di antaranya baik dari sisi nominal maupun jumlah investor merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel *Non-tradable* dan terbesar kedua sepanjang sejarah penerbitan SBN Ritel *Non-tradable* (setelah SBR011 yang terbit Juni 2022).

Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan), secara *prudent* dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Sampai dengan 14 Desember 2022, realisasi SKB I untuk tahun 2022 telah mencapai Rp49,12 triliun, sedangkan realisasi SKB III untuk tahun 2022 telah mencapai Rp95,42 triliun. Sisa target penerbitan SKB III akan dipenuhi pada bulan Desember 2022, namun perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan SKB di tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020.

Sampai dengan akhir November 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.554,25 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,65 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas

Komposisi Utang

per 30 November 2022

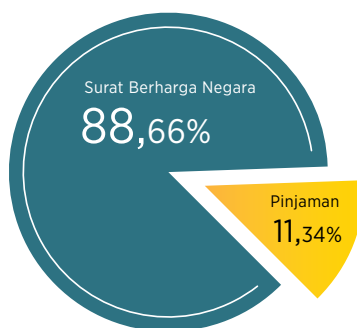
f Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

Posisi Utang Per 30 November 2022

Rp **7.554,25**

*dalam triliun rupiah

DEBT Debt to GDP : **38,65%**



Surat Berharga Negara

Rp **6.697,83**

*dalam triliun rupiah



| | |
|-------------------------------|-------------|
| ● Domestik | Rp 5.297,81 |
| Surat Utang Negara | Rp 4.317,74 |
| Surat Berharga Syariah Negara | Rp 980,08 |
| ● Valas | Rp 1.400,02 |
| Surat Utang Negara | Rp 1.066,68 |
| Surat Berharga Syariah Negara | Rp 333,34 |

Pinjaman

Rp **856,42**

*dalam triliun rupiah



| | |
|-----------------------|-----------|
| ● Pinjaman DN* | Rp 17,52 |
| ● Pinjaman LN* | Rp 838,90 |
| Bilateral | Rp 278,06 |
| Multilateral | Rp 510,35 |
| Comercial Banks | Rp 50,49 |
| Suppliers | Rp - |

pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,66 persen dari seluruh komposisi utang akhir November 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,36 persen. Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 15 Desember 2022 mencapai 14,64 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai

kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

Pengakuan dan apresiasi lembaga internasional atas pengelolaan ekonomi Indonesia yang baik juga ditunjukkan oleh reaffirmasi peringkat kredit Indonesia oleh *Fitch Ratings* (level *BBB/stable*) pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana pandangan positif dari S&P, Moody's R&I, dan JCR. Selama pandemi, lembaga *rating* utama marak melakukan *rating action* kepada berbagai negara yang terdampak, terutama pada kondisi fiskalnya. Selama 2022, Lembaga pemeringkat kredit (S&P, Moody's dan *Fitch Ratings*) telah melakukan 30 *Rating Upgrades*, 76 *Rating Downgrades*, dan 32 *Revisi Outlook Negative* (data per 17 Desember 2022). Sampai dengan saat ini, peringkat kredit Indonesia masih terjaga pada peringkat layak investasi (*investment grade*).

